



RENCANA STRATEGIS

Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Magetan

Tahun 2025–2029





KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

Magetan, 19 Desember 2025

Kepala Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Kabupaten Magetan



Sucipto, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 1966071141994031009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	1
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	19
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.1.1 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan	27
2.1.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.1.3 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan	18
2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan (jika ada)	23
2.1.5 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 35	
2.1.6 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	37
2.1 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	40
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	40
2.2.2 Isu Strategis	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	59
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	81



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	97
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah	97
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	213
BAB V PENUTUP	224
5.1 Kesimpulan.....	224
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	224
5.3 Pengendalian dan Evaluasi	226



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah.....	31
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	34
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan (LKJIP, Program saja)	41
Tabel 2.4 Kelompok Sasaran Layanan	18
Tabel 2.5 Mitra Perangkat Daerah	24
Tabel 2.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	35
Tabel 2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	38
Tabel 2.8 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.....	40
Tabel 2.9 Perumusan Isu Perangkat Daerah.....	55
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.....	64
Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.....	81
Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan	86
Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.....	87
Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	98
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan	146
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	208
Tabel 4.4 Perangkat Daerah	214



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah216



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.....	27
Gambar 3. 1 Pohon Kinerja Urusan Industri	70
Gambar 3. 2 Pohon Kinerja Urusan Industri	71
Gambar 3. 3 Pohon Kinerja Urusan Industri	72
Gambar 3. 4 Pohon Kinerja Urusan Industri dan Perdagangan ...	73
Gambar 3. 5 Pohon Kinerja Urusan Industri dan Perdagangan ...	74
Gambar 3. 6 Pohon Kinerja Urusan Perdagangan.....	75
Gambar 3. 7 Pohon Kinerja Urusan Perdagangan.....	76
Gambar 3. 8 Pohon Kinerja Urusan Perdagangan.....	77
Gambar 3. 9 Pohon Kinerja Urusan Perdagangan.....	78
Gambar 3. 10 Pohon Kinerja Urusan Perdagangan.....	79
Gambar 3. 11 Pohon Kinerja Urusan Perdagangan.....	80

BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

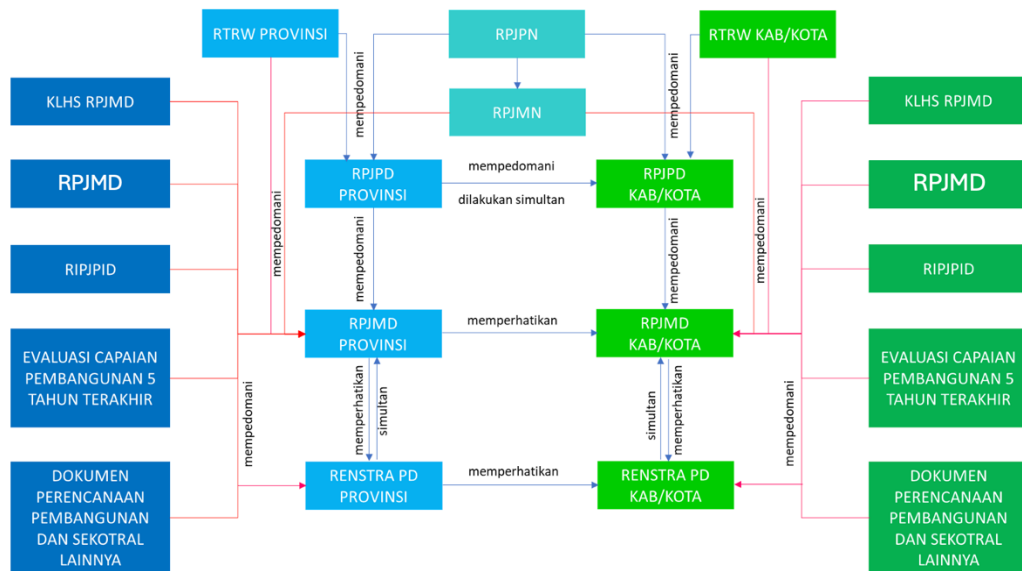
Berdasarkan Pasal 272 dan 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan. Ini disusun untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib atau Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Lebih lanjut, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 memperjelas bahwa Renstra adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berlaku untuk perangkat daerah selama periode lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan periode 2025–2029 berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang sangat penting. Dokumen ini bersifat teknis-operasional, yang berarti secara rinci menjelaskan bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan akan dilaksanakan. Selain itu, Renstra ini berperan sebagai alat untuk menerjemahkan visi, misi, dan program Kepala Daerah menjadi langkah-langkah pembangunan yang sistematis dan terukur. Ini berarti, setiap tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh pimpinan daerah akan dijabarkan menjadi kegiatan konkret yang dapat diukur keberhasilannya. Lebih jauh, Renstra ini menjadi dasar utama dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dengan demikian, setiap rencana kerja tahunan harus selaras dan mendukung tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Terakhir, dokumen ini juga berfungsi



sebagai panduan atau acuan untuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ini memastikan bahwa semua program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

Pedoman penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh, yaitu: dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir) Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah.



Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Dalam Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Selain itu, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menjabarkan keterkaitan dengan berbagai



dokumen perencanaan. Penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta memperhatikan dokumen seperti RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu; konsistensi dan keterpaduan antar dokumen ini sangat penting untuk memastikan pembangunan daerah berjalan efektif dan terarah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
14. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017



- Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
 26. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);



27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
30. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
31. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);



34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
40. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;



43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025 - 2045;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2044;
47. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;
48. Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah dan kondisi daerah pada saat itu
2. Pedoman perencanaan dan monitoring atau pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan dalam rangka meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan meningkatnya industri perdangan kecil menengah yang dilaksanakan oleh disperindag Kabupaten Magetan yang memuat pokok-pokok kebijakan dan



program/ kegiatan/ sub-kegiatan dalam Urusan Disperindag selama tahun 2025-2029.

Dengan maksud diatas maka tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DISPERINDAG selama periode 5 (lima) tahun mendatang sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan
2. Pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan DISPERINDAG Kabupaten Magetan.
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 (lima) tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

1.1 Latar Belakang

Menguraikan secara ringkas latar belakang penyusunan Renstra, termasuk kondisi aktual yang melatarbelakangi, dasar hukum atau regulasi yang menjadi landasan, serta nilai strategis dokumen Renstra dalam konteks perencanaan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Sub bab ini memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renstra, meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,



Peraturan Daerah, serta ketentuan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta kewenangan perangkat daerah. Selain itu, bab ini juga menjelaskan pedoman perencanaan dan penganggaran yang dijadikan acuan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dalam menyusun dokumen Renstra secara sistematis dan sesuai ketentuan yang berlaku.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sub bab ini memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Maksud menguraikan peran Renstra sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan perangkat daerah selama lima tahun ke depan, sedangkan tujuan merinci sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan dokumen Renstra agar selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sub bab ini menguraikan pokok-pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta menyajikan susunan garis besar isi dokumen secara sistematis. Sistematika penulisan Renstra disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dokumen, mulai dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hingga strategi, program, dan kegiatan yang direncanakan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun perencanaan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

2.1 : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah



Pada bagian ini menguraikan GTugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Layanan

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berisi penjelasan umum mengenai dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi hingga satu tingkat eselon di bawah kepala perangkat daerah. Uraian ini mencakup bentuk organisasi, jumlah personel, serta tata laksana yang meliputi proses, prosedur, dan mekanisme kerja di lingkungan perangkat daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Menggambarkan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, meliputi sumber daya manusia, aset/modal, serta unit-unit usaha yang masih operasional dan relevan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra periode sebelumnya, sebagai bentuk evaluasi awal dalam perencanaan lima tahunan ke depan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Menjelaskan kelompok masyarakat atau pihak-pihak yang menjadi penerima manfaat langsung dari pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, serta karakteristik dan kebutuhan utamanya.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mendesripsikan permasalahan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan oleh perangkat daerah, baik yang bersifat internal maupun eksternal, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan analisis terhadap kebutuhan pelayanan publik.



2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Menjelaskan peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Mendeskripsikan kerja sama daerah yang merupakan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2.2 : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Mendeskripsikan permasalahan pelayanan perangkat daerah yang menjadi tantangan penyelenggaraan pelayanan.

2.2.2 Isu Strategis

Mengidentifikasi isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap kinerja dan eksistensi perangkat daerah dalam lima tahun ke depan, yang menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas. Isu strategis disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, termasuk memperhatikan arah kebijakan RPJMD dan dokumen perencanaan nasional maupun provinsi.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini termuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan P2KB, yang terdiri atas:

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan perangkat daerah menjelaskan rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah. Sasaran merupakan turunan dari tujuan renstra yang menguraikan hasil yang akan dicapai secara spesifik dalam jangka menengah.



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi menjelaskan langkah-langkah strategis yang dirumuskan oleh perangkat daerah untuk menjamin ketercapaian tujuan dan sasaran, disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Arah kebijakan menjabarkan fokus kebijakan yang akan diambil perangkat daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan untuk lima tahun ke depan.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggara bidang urusan, sebagai berikut:

4.1 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penjabaran program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah beserta kinerja, indikator, target capaian, dan pagu indikatif anggaran. Penjabaran ini disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra secara terukur dan efektif, sekaligus menunjang pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bagian ini juga menjelaskan keterkaitan antara program dan kegiatan dengan indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja kunci (IKK) sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah.

BAB V. PENUTUP

Penutup memuat kesimpulan umum atas keseluruhan isi dokumen serta harapan agar pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan secara efektif, terarah, dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selain itu, bab ini juga menegaskan pentingnya komitmen



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN,
PERMASALAHAN, DAN
ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Daerah

Organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan unsur pembantu kepala daerah Gubernur/Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pembentukan dan susunan OPD diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Secara umum, tugas pokok perangkat daerah adalah membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah lainnya.

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2025, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, yang membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- e. Bidang Perdagangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;



- f. Bidang Pasar yang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Sekretaris mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.



Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, ketertiban, keamanan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
- b. penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- c. pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
- d. pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kesejahteraan pegawai, dan organisasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Kepala Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, bimbingan teknis, fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri dan izin usaha industri, mengembangkan dan menerapkan teknologi, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja kegiatan di bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;



- b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang industri pangan, kulit, hasil hutan dan kerajinan;
- c. pelaksanaan verifikasi perizinan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) serta pengawasan dan pengendalian perijinan sektor industri pangan, kulit, hasil hutan, dan kerajinan;
- d. pelaksanaan pemberian fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha industry kecil menengah dan sentra-sentra;
- e. pelaksanaan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi;
- g. pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia industri, aparatur industry dan penataan asosiasi industri pangan, kulit, hasil hutan, dan kerajinan;
- h. pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industry pangan, kulit, hasil hutan, dan kerajinan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang industri pangan, kulit, hasil hutan, dan kerajinan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Kepala Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja, bimbingan teknis,



fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri dan ijin usaha industri, mengembangkan dan menerapkan teknologi, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan bidang industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. . penyusunan rencana kerja kegiatan di bidang industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
- b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan teknis dan pengembangan usaha kegiatan bidang industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
- c. pelaksanaan fasilitasi penerbitan/rekomendasi Tanda Daftar Industri dan Ijin Usaha Industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
- d. pelaksanaan pemberian fasilitasi dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah dan sentra-sentra;
- e. pelaksanaan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi;
- g. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia industri, aparatur industri dan penataan asosiasi industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
- h. pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri sandang, bahan bangunan, logam dan aneka;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sandang, bahan bangunan, logam dan aneka; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.



2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Kepala Bidang perdagangan mempunyai tugas menyusun rencana kegiatan di bidang bina perdagangan, melaksanakan bimbingan teknis usaha dan sarana perdagangan, melaksanakan pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan, melakukan perlindungan terhadap konsumen dan melaksanakan pengawasan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang perdagangan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis kegiatan pengembangan usaha perdagangan;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin perdagangan;
- d. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap barang-barang subsidi;
- e. pelaksanaan pengawasan monitoring dan evaluasi distribusi barang;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan pedagang kaki lima dan Industri Kecil Menengah (IKM);
- g. pelaksanaan fasilitasi pameran / promosi produk-produk Industri Kecil Menengah (IKM);
- h. pelaksanaan misi dagang antar daerah;
- i. pelaksanaan verifikasi perizinan dan pendaftaran perusahaan melalui *Online Single Submission* (OSS);
- j. pelaksanaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- k. pelaksanaan stabiliasi barang kebutuhan pokok dan barang penting;



- l. pelaksanaan pemantauan distribusi, harga, dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah, dan penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- m. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- n. pelaksanaan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- o. pelaksanaan promosi produk dalam negeri dan pengembangan ekspor daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pasar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Kepala Bidang Pasar mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan, pembinaan, mengelola dan mengembangkan pasar daerah, menyelenggarakan jasa dan manfaat umum di bidang kegiatan pasar bagi masyarakat, menyediakan tempat untuk berjualan dan berbelanja, menyelenggarakan penarikan, pungutan retribusi, sewa dan jasa pasar lainnya, menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan di lingkungan pasar.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang pasar;
- b. perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk mempersiapkan, mengelola, menelaah, menyusun program dan kebijaksanaan teknis dan program kerja;

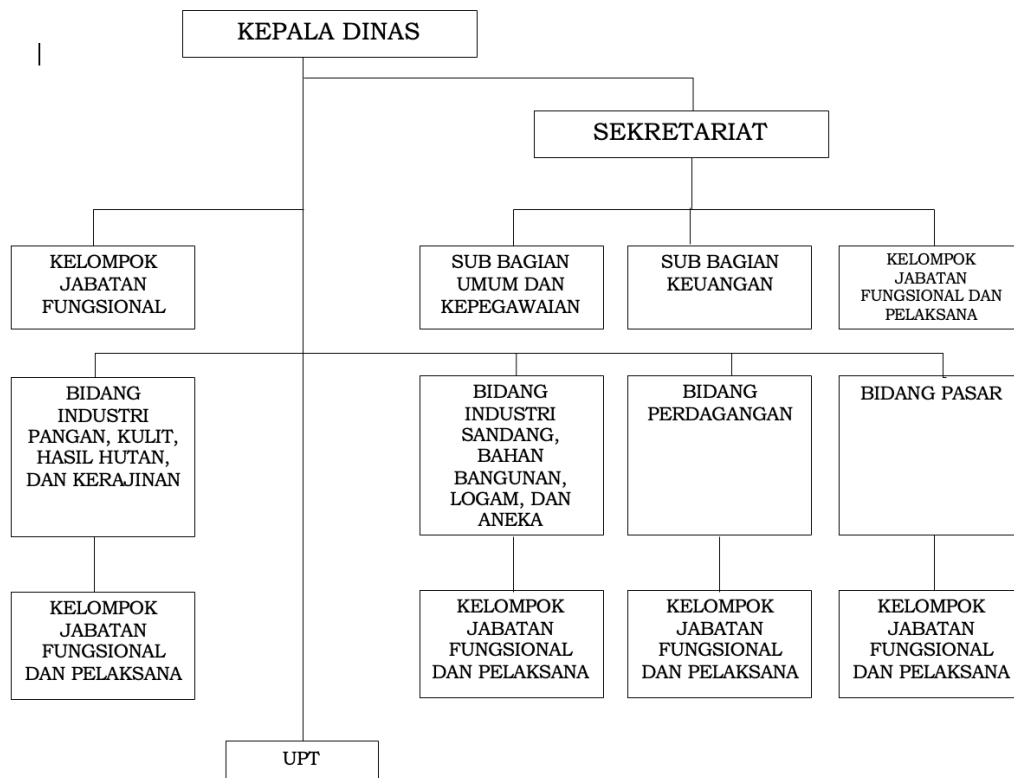


- c. pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pungutan dan pemasukan pendapatan daerah sesuai bidang tugas berdasarkan peraturan yang berlaku;
- d. pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pengendalian teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 06 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, disajikan pada bagan berikut:



Gambar 2. 1 Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

Pelaksanaan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan harus dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien, sehingga memerlukan dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya berperan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi perangkat daerah, yang mencakup sumber daya manusia dan asset/sarana prasarana. Dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta adanya berbagai regulasi dari pemerintah, maka diperlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan, sasaran, dan program yang ditetapkan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.



2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menuntut dukungan sumber daya manusia yang memadai, kompeten, profesional dan berintegritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Saat ini, **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan** memiliki 64 pegawai. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenjang jabatan struktural dan fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	10	1	11
3	Golongan III	19	13	32
4	Golongan IV	4	0	4
5	Jabatan Fungsional	6	8	14
6	PPPK	0	3	3
Jumlah				64

Sumber : Disperindag Kab. Magetan, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan SDM pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan berada dalam kondisi **belum ideal**. Sehingga, ke depannya diperlukan langkah-langkah penguatan melalui pengisian jabatan kosong, penataan ulang struktur jabatan, serta peningkatan kapasitas ASN guna mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi secara optimal.

Selain aspek jabatan, kondisi pegawai juga dapat dilihat dari tingkat kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Tingkat pendidikan menjadi indikator penting dalam menilai kapasitas individual pegawai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan



publik yang semakin kompleks dan berbasis pengetahuan. Jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebanyak **64 orang** dapat dirincikan berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Jumlah SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS/PPPK		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	3	1	-	-	4
2	SMA Sederajat	14	5	-	-	19
3	D3	2	1	-	-	3
4	D4	1	-			1
5	S1	13	15	-	-	28
6	S2	6	3	-	-	9
Jumlah						64

Sumber : Disperindag Kab. Magetan, 2025

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang **Sarjana S-1**, yang mencerminkan **kesiapan** dalam memenuhi tuntutan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada **Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan** dapat dirincikan berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:



Tabel 2. 3 Jumlah SDM Berdasarkan Usia

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Usia < 30	0	4	4
2	Usia 30-39 tahun	4	5	9
3	Usia 40-49 tahun	16	9	25
4	Usia ≥ 50 tahun	19	7	26
Jumlah				64

Sumber: Disperindag Kab. Magetan, 2025

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kelompok usia **lebih dari 50 tahun** mendominasi komposisi pegawai saat ini. Hal ini mengindikasikan kebutuhan regenerasi pegawai. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis SDM yang mempertimbangkan aspek demografi agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim) yang diselenggarakan oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kapasitas kepemimpinan para pejabat struktural di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya strategis dalam mewujudkan aparatur yang berintegritas, inovatif, dan mampu menjalankan fungsi manajerial secara efektif. Adapun jumlah sumber daya manusia yang telah mengikuti Diklat Pim adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Jumlah SDM Berdasarkan Keikutsertaan Diklat Pim

No	Jenis Diklat	L	P	Jumlah
1	Pim II	1	0	1
2	Pim III	1	0	1
3	Pim IV	2	2	4
Jumlah				6

Sumber : Disperindag Kab. Magetan, 2025



Berdasarkan data jenis pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklat Pim) yang telah diikuti oleh pegawai, diketahui bahwa terdapat total enam orang peserta yang telah mengikuti Diklat Pim pada berbagai jenjang. Rinciannya adalah sebagai berikut: Sebanyak satu orang pegawai laki-laki telah mengikuti Diklat Pim II, dan satu orang laki-laki lainnya mengikuti Diklat Pim III. Sementara itu, pada Diklat Pim IV, terdapat empat orang peserta, terdiri atas dua laki-laki dan dua perempuan. Dengan demikian, secara keseluruhan, jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim adalah enam orang, dengan komposisi empat laki-laki dan dua perempuan.

2.1.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Sarana Prasarana Perangkat Daerah

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
1	Kantor Dinas	√	√	2
2	Rumah Promosi	√		1
3	UPTD Metrologi	√		1
4	Pasar Tradisional	√		17
5	Pasar Hewan	√		6
6	Kendaraan Roda 4	√		6
7	Kendaraan Roda 2	√		13
8	Kendaraan Roda 3	√		15
9	Mesin ketik elektrik	√		15
10	Lemari	√		7



No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak Layak	
11	Lemari		√	6
12	Filling	√		25
13	Filling		√	11
14	Meja kerja	√		38
15	Meja kerja		√	18
16	Kursi kerja	√		58
17	PC	√		22
18	PC		√	8
19	Laptop	√		14
20	Laptop		√	9
21	Printer	√		36
22	Printer		√	5
23	Scanner	√		2
24	AC	√		15
25	AC		√	5
26	Pemadam kebakaran	√		79

Sumber: Disperindag Kab. Magetan, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mayoritas berada dalam kondisi **layak guna**. Meski begitu, tetap diperlukan langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak, penghapusan aset tidak layak, serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menetapkan arah kebijakan yang



dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Bidang-bidang terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan Usaha Perdagangan				7,09	7,1	7,11	7,15	7,15	12,28	2,57	3,04	7,15	7,15	173,2	36,2	42,7	100	100
2	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah				0,180	0,185	0,19	0,2	0,200	0,12	0,6	0,07	0,2	0,200	66,66	0,32	36,84	100	100
3	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan				80,90	85,40	85,45	85,45	84,78	80,90	85,40	85,45	85,45	84,78	100	100	100	99,52	100
4	Indeks Kepuasan Masyarakat				77,48	77,12	79,56	80,75	79,75	77,48	77,12	79,56	80,75	79,50	100	100	100	100	99,69

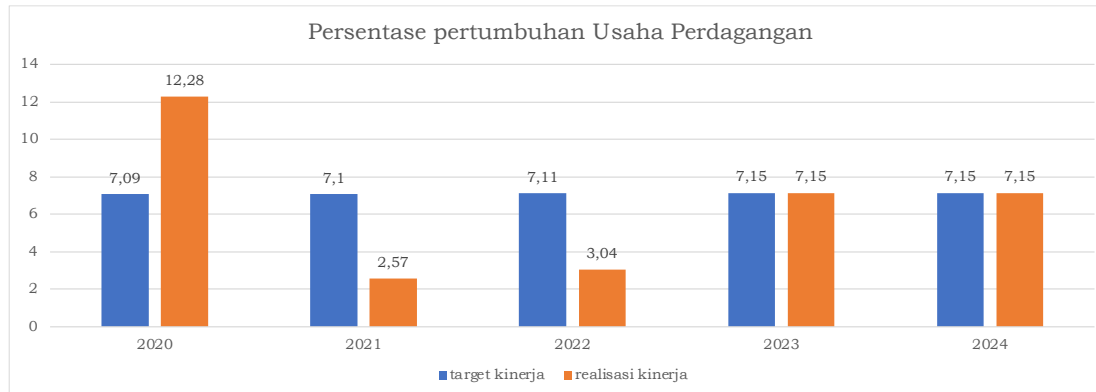


No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun					
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Urusan Perindustrian dan Perdagangan																			

Sumber: LKJIP Disperindag Kab. Magetan



1. Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan

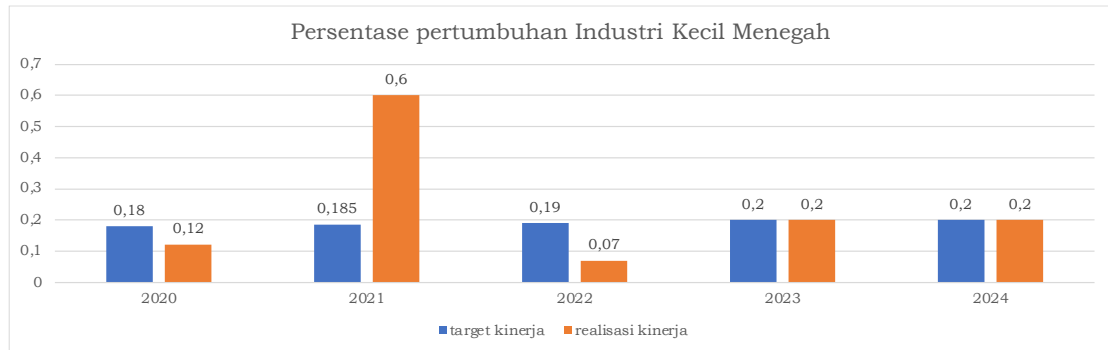


Grafik 2. 1 Indikator Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Indikator Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan Kabupaten Magetan menunjukkan fluktuasi kinerja selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian mencapai 12,28% dan melampaui target 7,09%, namun menurun tajam pada 2021–2022 dengan realisasi masing-masing 2,57% dan 3,04% akibat dampak pandemi, menurunnya daya beli masyarakat, serta belum optimalnya digitalisasi perdagangan. Sejak 2023 hingga 2024, capaian kembali stabil dan mencapai target sebesar 7,15% seiring pemulihan aktivitas ekonomi, peningkatan promosi produk lokal, serta dukungan kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dalam pemberdayaan pelaku usaha dan penguatan pasar rakyat.



2. Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

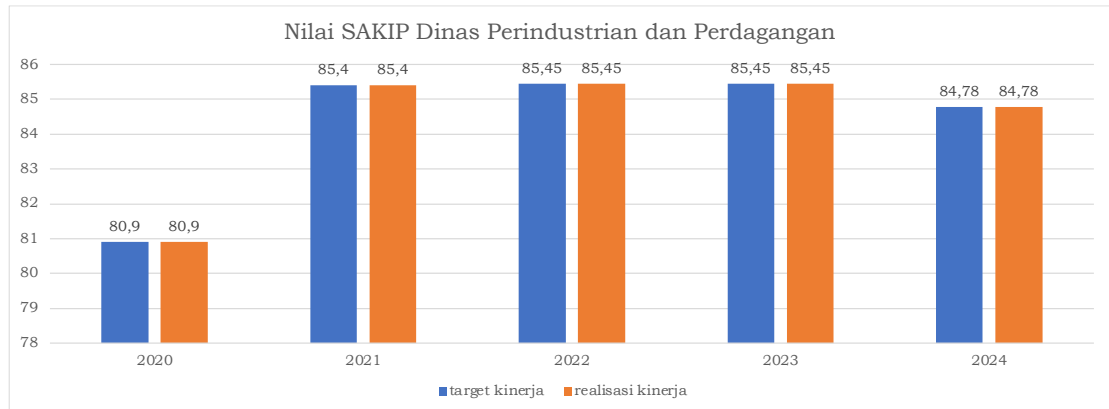


Grafik 2. 2 Indikator Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah

Indikator Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Magetan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, capaian kinerja (0,12%) masih di bawah target (0,18%), namun pada tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan hingga 0,6%, jauh melampaui target 0,185%. Peningkatan tersebut menggambarkan keberhasilan pelaku IKM beradaptasi dengan kondisi pascapandemi melalui inovasi produk dan peningkatan permintaan pasar lokal. Pada tahun 2022 capaian menurun menjadi 0,07%, dipengaruhi oleh keterbatasan bahan baku, daya saing produk, serta keterhubungan pasar yang belum merata. Meskipun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 kinerja kembali stabil dan mampu memenuhi target 0,2%, menandakan adanya pemulihan aktivitas produksi dan penguatan pembinaan terhadap pelaku IKM. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan berhasil menjaga tren positif pertumbuhan IKM melalui dukungan kebijakan, fasilitasi permodalan, serta pengembangan kualitas dan pemasaran produk lokal.



3. Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan

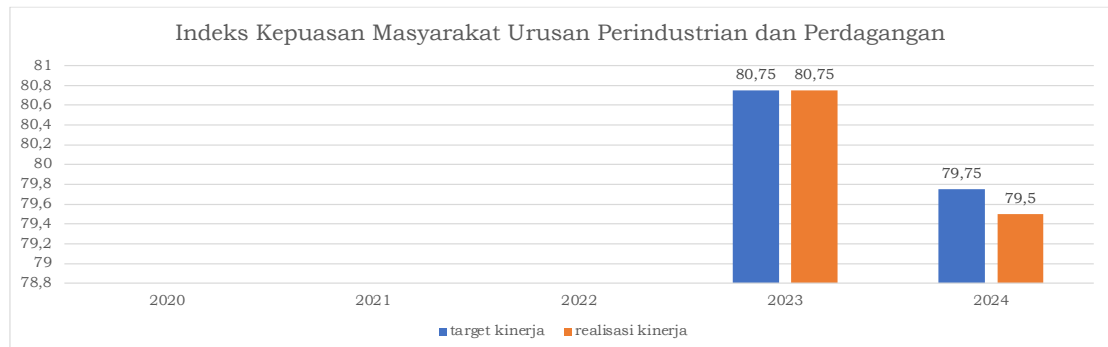


Grafik 2. 3 Indikator Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Indikator Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menunjukkan perkembangan yang konsisten dan positif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai capaian sebesar 80,9 sudah melampaui target yang sama, menandakan dasar kinerja akuntabilitas yang baik. Memasuki tahun 2021 hingga 2023, nilai SAKIP meningkat dan stabil di kisaran 85,4–85,45, dengan capaian yang selalu sejalan bahkan sedikit melampaui target. Kinerja ini mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang semakin terintegrasi. Meski pada tahun 2024 nilai sedikit menurun menjadi 84,78, capaian tersebut masih menunjukkan konsistensi tinggi dan berada dalam kategori sangat baik. Pencapaian ini menggambarkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan terus berupaya memperkuat sistem akuntabilitas kinerja melalui peningkatan tata kelola, efektivitas program, dan pengawasan internal yang berkesinambungan.



4. Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan



Grafik 2. 4 Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Urusan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan tahun 2020 sampai 2022 belum tersedia dikarenakan mulai diukur pada tahun 2023. Pada tahun tersebut, capaian sebesar 80,75 telah memenuhi target yang ditetapkan, menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap layanan yang diberikan. Kondisi ini mencerminkan adanya pelayanan publik yang responsif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pada tahun 2024, nilai capaian sedikit menurun menjadi 79,5 dari target 79,75. Penurunan ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pelayanan, terutama dalam hal kecepatan, kemudahan akses, serta penanganan keluhan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan telah mampu menjaga tingkat kepuasan masyarakat pada kategori baik, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat kinerja pelayanan publik di tahun-tahun berikutnya.



Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020–2024 mencerminkan sejauh mana alokasi sumber daya (*input*) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:



Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata	
											Tahun					Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Rp414.060.000	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp397.140.140	N/A	N/A	N/A	N/A	96%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI DAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Rp581.371.600	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp386.586.178	N/A	N/A	N/A	N/A	66%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PASAR DAERAH	Rp12.994.010.600	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp12.018.242.109	N/A	N/A	N/A	N/A	92%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGA	Rp193.575.750	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp190.818.050	N/A	N/A	N/A	N/A	99%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-



Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata	
											Tahun					Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
NG KAKI LIMA DAN ASONGAN																	
PROGRAM PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL BIDANG PERDAGANGAN	Rp100.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp95.398.450	N/A	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	Rp293.137.800	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp284.262.956	N/A	N/A	N/A	N/A	97%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN	Rp3.696.886.500	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp2.878.637.300	N/A	N/A	N/A	N/A	78%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-



Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Tahun					Anggaran	Realisasi	
MENENGAH																		
PROGRAM Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Rp450.380.000	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp430.617.100	N/A	N/A	N/A	N/A	96%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	
PROGRAM Penataan Struktur Industri	Rp50.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp48.048.750	N/A	N/A	N/A	N/A	96%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	
PROGRAM Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Perindustrian	Rp900.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp842.428.696	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	
PROGRAM Pelayanan Adminis	Rp590.182.200	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp553.695.982	N/A	N/A	N/A	N/A	94%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	



Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata	
											Tahun					Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
TRASI PERKAN TORAN																	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR	Rp238.248.800	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp233.670.850	N/A	N/A	N/A	N/A	98%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Rp30.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp25.204.550	N/A	N/A	N/A	N/A	84%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN	Rp20.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp16.168.000	N/A	N/A	N/A	N/A	81%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata	
											Tahun					Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
KEUANGAN																	
PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, LAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp20.000.000	N/A	N/A	N/A	N/A	Rp19.678.500	N/A	N/A	N/A	N/A	98%	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	N/A	N/A	Rp100,000,000.00	Rp96,828,300.00	Rp141,000,000.00	N/A	N/A	Rp98,708,250.00	Rp93,998,848.00	Rp102,747,550	N/A	N/A	98,71%	97,08%	73%	-	-
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	N/A	Rp9,281,468,944	Rp12,208,368,500.00	Rp6,078,495,406.00	Rp5,595,000.00	N/A	Rp8,316,839,900	Rp11,579,695,751.50	Rp6,004,644,208.00	Rp5,530,151,234	N/A	89.61%	94,85%	98.79%	99%	-	-



Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata	
											Tahun					Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	N/A	Rp 90,000 ,000	Rp 395,000, 000.00	Rp 377,2 59,10 0.00	Rp 267,5 00,00 0	N/A	Rp 89,79 9,100	Rp 376,396, 825.00	Rp 373,598 ,250.00	Rp 219,0 80,12 4	N/A	99.78 %	95,29 %	99,03 %	82%	-	-
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	N/A	N/A	Rp 250,000, 000.00	Rp 93,72 9,150 .00	Rp 95,00 0,000	N/A	N/A	Rp 207,904, 050.00	Rp 84,079, 170.00	Rp 81,82 4,000	N/A	N/A	83,16 %	89,70 %	86%	-	-
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	N/A	Rp 85,000 ,000	Rp 400,000, 000.00	Rp 181,4 00,00 0.00	Rp 180,0 00,00 0	N/A	Rp 84,83 5,050	Rp 398,290, 652.00	Rp 176,560 ,200.00	Rp 179,9 40,00 0	N/A	99.81 %	99,57 %	97,33 %	100%	-	-
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN	N/A	Rp 65,000 ,000	Rp 450,000, 000.00	Rp 224,2 30,50 0.00	Rp 270,0 00,00 0	N/A	Rp 64,49 6,000	Rp 412,159, 900.00	Rp 215,290 ,215.00	Rp 222,1 48,15 0	N/A	99.23 %	91,59 %	96,01 %	82%	-	-



Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata		
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Tahun					Anggaran	Realisasi	
PRODUK DALAM NEGERI																		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	N/A	Rp 5,635, 534,00 0	Rp 4,291,39 1,000.00	Rp 1,554 ,074, 050.0 0	Rp 2,780, 000,0 00	N/A	Rp 4,559, 344,5 56	Rp 4,146,13 6,429.00	Rp 1,541,3 14,900. 00	Rp 2,562 ,347, 462	N/A	80.90 %	96,62 %	99,18 %	92%	-	-	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	N/A	N/A	Rp 881,000, 000.00	Rp 50,00 0,000 .00	Rp 75,00 0,000	N/A	N/A	Rp 875,340, 058.00	Rp 49,075, 000.00	Rp 69,67 0,500	N/A	N/A	99,36 %	98,15 %	93%	-	-	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	N/A	Rp 285,00 0,000	Rp 540,000, 000.00	Rp 247,2 39,40 0.00	Rp 125,0 00,00 0	N/A	Rp 244,1 89,75 0	Rp 535,406, 450.00	Rp 246,224 ,159.00	Rp 116,2 19,75 0	N/A	85.68 %	99,15 %	99,59 %	93%	-	-	



Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-Rata	
											Tahun					Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	N/A	Rp 10,686 ,265,9 06	Rp 9,498,62 9,129.00	Rp 9,329 ,343, 365.0 0	Rp 10,56 1,517, 354	N/A	Rp 8,923, 058,7 05	Rp 8,916,35 6,193.00	Rp 8,987,3 09,353. 00	Rp 9,986 ,723, 549	N/A	83.50 %	93,87 %	96,33 %	95%	-	-

Sumber: LKJIP Disperindag Kab. Magetan

Berdasarkan analisis capaian anggaran, sebagian besar program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menunjukkan kecenderungan peningkatan rasio realisasi anggaran dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan semakin baiknya kualitas perencanaan dan



pengelolaan pendanaan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan serta Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen menunjukkan kinerja anggaran yang optimal dengan rasio realisasi di atas 90%, bahkan mencapai 100% pada tahun 2024. Namun demikian, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mengalami penurunan rasio realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar 73%, yang menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Renstra untuk perbaikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pada periode selanjutnya.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan anggaran menunjukkan perkembangan yang positif dan menjadi dasar penguatan strategi pendanaan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Adapun keterangan N/A menunjukkan bahwa program tidak dilanjutkan pada tahun tertentu, atau merupakan program baru yang pelaksanaannya dimulai pada tahun berjalan sehingga target dan capaian kinerja hanya tersedia pada tahun tersebut.



2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan PD

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan selama periode perencanaan strategis.

Tabel 2.8 Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
Bidang Perdagangan			
1.	Pembinaan Pedagang Kaki Lima	1. Pelayanan pembinaan pedagang kaki lima 2. Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana peralatan jualan pedagang kaki lima	Pedagang Kaki Lima
2.	Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	1. Pelayanan Perijinan Pelaku Usaha Perdagangan 2. Pengawasan dan	Pelaku Usaha Perdagangan



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
Bidang Perdagangan			
		Pengendalian Perijinan Pelaku Usaha Perdagangan 3. Pelayanan Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	
3.	Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota	1. Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Agen dan Pasar Rakyat 2. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi perdagangan 3. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Pelaku Usaha Perdagangan



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
Bidang Perdagangan			
		4. Operasi pasar reguler dan pasar khusus 5. Pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota	
4.	Fasilitasi Pemasaran, Pameran, Misi Dagang, dan Pengembangan Ekspor Produk Unggulan Daerah	Fasilitasi Pemasaran, Pameran, Misi Dagang, dan Pengembangan Ekspor Produk Unggulan Daerah	IKM dan Pelaku Usaha Ekspor
Bidang Pasar			
1.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1. Penyediaan tempat jualan berupa Los dan Kios Pasar 2. Pembangunan/Revitalisasi/Rehabilitasi Pasar Daerah	Pedagang Pasar
2.	Fasilitasi Sarana Distribusi Perdagangan	1. Penarikan Retribusi Pasar dan Parkir Khusus Pasar melalui QRIS 2. Penyediaan	Pedagang Pasar dan Pengunjung Pasar



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
Bidang Perdagangan			
		fasilitasi layanan kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Pasar 3. Pelayanan Surat Keterangan Hak Penempatan Tempat Jualan (SKHPTJ) bagi Pedagang	
UPTD Metrologi Legal			
1.	Perlindungan Konsumen	Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP di Kabupaten Magetan	Pemilik Alat UTTP
	Pengawasan UTTP, BDKT, dan Satuan Ukuran	Monitoring dan pengawasan SPBU, Sosialisasi BDKT dan Satuan Ukuran	Pelaku Usaha (Pedagang, Pemilik SPBU, dan Pemilik Alat UTTP)
Bidang Industri Agro			
1.	Pembinaan Industri Kecil Menengah	1. Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelatihan dan fasilitasi peralatan produksi 2. short course 3. Pelayan pendampingan usaha industry 4. Pelayan Hak	Industri Kecil Menengah Pangan, Kulit, Hasil Hutan, dan Kerajinan



No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
Bidang Perdagangan			
		Kekayaan Intelektual (HKI) merek, paten, indikasi geografis 5. Pelayanan pendampingan Halal 6. Pelayanan Pendampingan SIINas dan Pelaporan SIINas 7. pengawasan dan pengendalian Perizinan Industri 8. pemberian rekomendasi klasifikasi usaha industri	
Bidang Industri Non Agro			
1.	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka	Pendampingan perizinan berusaha, pemberian bantuan peralatan produksi, peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM	Industri Kecil dan Menengah dan kelompok Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan, 2025

Tabel di atas menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan pada periode ini. Setiap kelompok sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan. Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok sasaran, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dapat menyusun strategi yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih optimal.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan:



Tabel 2.9 Mitra Perangkat Daerah

No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Satpol PP dan Damkar	<ul style="list-style-type: none">• Pembinaan Pedagang Kaki Lima• Pengawasan toko modern• Pemantauan peredaran barang pokok dan barang penting pada pelaku distribusi perdagangan• Pelaksanaan pasar murah• Penertiban pedagang pasar	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya Ketertiban Pedagang Kaki Lima• Terlaksananya ketertiban jam operasional toko modern• Terlaksananya ketertiban berusaha pada pelaku usaha• Terlaksananya ketertiban pelaksanaan pasar murah• Terlaksananya penertiban pedagang pasar
2.	Dinas Kesehatan	Pemeriksaan sampel makanan dan minuman pedagang kaki lima	Terwujudnya makanan dan minuman yang aman dikonsumsi masyarakat



No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
3.	Polres	Pemantauan peredaran barang pokok dan barang penting pada pelaku distribusi perdagangan dan pasar rakyat	Terlaksananya ketertiban dan kepatuhan peraturan pelaku usaha perdagangan
4.	Kejaksaan Negeri	<ul style="list-style-type: none">• Pemantauan peredaran barang pokok dan barang penting pada pelaku distribusi perdagangan dan pasar rakyat• Pendampingan dan pembuatan Legal Opinion	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya ketertiban dan kepatuhan peraturan pelaku usaha perdagangan• Terlaksananya pendampingan dan pembuatan Legal Opinion
5.	Pertamina	<ul style="list-style-type: none">• Pemantauan peredaran barang pokok dan barang penting pada pelaku distribusi perdagangan• Melakukan pemeriksaan dan pengawasan SPBU dan	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya ketertiban dan kelancaran distribusi barang• Meningkatkan ketepatan dan keakuratan pada alat



No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
		Pertashop di wilayah Kab. Magetan	
6.	Hiswana Migas	<ul style="list-style-type: none">• Pemantauan peredaran barang pokok dan barang penting pada pelaku distribusi perdagangan• Menjalin kerjasama dengan Pertamina untuk memastikan distribusi dan pasokan minyak berjalan lancar	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya ketertiban dan kelancaran distribusi barang• Menjaga stok pasokan minyak dapat terdistribusikan pada masyarakat
7.	PT. Pupuk Indonesia	Pengawasan pupuk dan pestisida	Terlaksananya ketertiban dan kepatuhan peraturan pelaku usaha distribusi pupuk dan pestisida
8.	UPT Perlindungan	Pemantauan peredaran barang	Terlaksananya ketertiban dan



No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
	Konsumen Kediri	pokok dan barang penting pada pelaku distribusi perdagangan dan pasar rakyat	kepatuhan peraturan pelaku usaha perdagangan
9.	Balai Standarisasi dan Metrologi Legal Kementrian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none">memastikan bahwa label pada barang beredar sesuai dengan ketentuan takaran, ukuran, timbangan, dan perlengkapannya (TUTTP) serta kebenaran informasi kuantitas bersih barang dalam kemasan.	Terlaksananya ketertiban label pada barang beredar sesuai dengan ketentuan takaran, ukuran, timbangan, dan perlengkapannya (TUTTP) serta kebenaran informasi kuantitas bersih barang dalam kemasan.
10.	Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none">Pemantauan peredaran barang pokok dan barang penting pada pelaku distribusi	<ul style="list-style-type: none">Terlaksananya kelancaran oprasi pasar dan pasar murahTerlaksananya pengelolaan



No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
		perdagangan dan pasar rakyat <ul style="list-style-type: none">• Pelayanan Sampah	sampah/limbah pasar
11.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none">• Pemantauan peredaran barang pokok dan barang penting pada pelaku distribusi perdagangan dan pasar rakyat• Pengawasan pupuk dan pestisida	Terlaksananya kelancaran pasar murah Terlaksananya kelancaran pengawasan pupuk dan pestisida
12.	Dinas Peternakan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none">• Pemantauan peredaran barang pokok dan barang penting pada pelaku distribusi perdagangan dan pasar rakyat	Terlaksananya kelancaran pasar murah
13.	Bulog	<ul style="list-style-type: none">• Pemantauan peredaran barang pokok dan barang	<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya kelancaran distribusi barang



No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
		penting pada pelaku distribusi perdagangan dan pasar rakyat <ul style="list-style-type: none">• Tera ulang timbangan jembatan Bulog	kebutuhan pokok di pasar rakyat dan retail <ul style="list-style-type: none">• Kesesuaian ukuran
14.	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pasar murah• Pelaksanaan Car Free Day	Terlaksananya kelancaran pasar murah dan ketertiban Car Free Day
15.	Praktisi Pemasaran	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pembinaan dan pemasaran pada pelaku usaha perdagangan	Terlaksananya pembinaan dan pemasaran produk pada pelaku usaha perdagangan dan IKM
16.	Event Organizer	<ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan pameran produk unggulan daerah	Terlaksananya pameran produk unggulan daerah
17.	Kementrian Perdagangan	<ul style="list-style-type: none">• Sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok	Tersedianya informasi harga dan ketersediaan bahan pokok
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none">• Sistem informasi ketersediaan dan perkembangan	Tersedianya informasi harga dan ketersediaan bahan pokok



No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
	Provinsi Jawa Timur	harga bahan pokok	
19.	BRI	E-retribusi Pasar	Terlaksananya layanan E-retribusi Pasar
20.	Sinergi Gula Nusantara	<ul style="list-style-type: none">• Tera ulang timbangan jembatan	Kesesuaian ukuran
21.	BPOM	<ul style="list-style-type: none">• <i>Pengawasan obat dan makanan</i>	<i>Meningkatkan kualitas ketersediaan obat dan makanan minuman</i>
22.	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none">• <i>Pelayanan Sertifikasi Halal</i>	<i>Terlaksananya layanan Produk Halal bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah</i>
23.	Kementerian Perindustrian	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan Sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Terlaksananya layanan Tingkat Komponen Dalam Negeri
24.	DPMPTSP	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan Perizinan Berusaha	terlaksananya perizinan berusaha sektor industry
25.	Balai Besar Kulit, Karet,	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan Sertifikasi Tingkat	<i>Meningkatkan kualitas produk kulit, karet, dan plastik</i>



No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
	dan Plastik Yogyakarta	Komponen Dalam Negeri (TKDN) <ul style="list-style-type: none">• Pelayanan pengembangan penyamakan kulit, produk kulit, karet, dan plastik• Pelayanan SNI produk IKM	
26.	Balai Riset dan Standarisasi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none">• <i>Pelayanan Sertifikasi Produk IKM</i>	<i>Terlaksananya layanan standarisasi Produk pelaku IKM</i>
27.	Kementerian Hukum	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Terlaksananya layanan HAKI
28.	UPTI Makanan, Minuman, Kemasan Prov. Jatim	<ul style="list-style-type: none">• Pelayanan pengembangan produk mamin dan kemasan	terlaksananya layanan pengembangan IKM Makanan dan Minuman
29.	UPTI Pengembangan Mutu Produk dan Teknologi	Pelayanan pengembangan Mutu produk dan teknologi kreatif bagi IKM	<i>Meningkatkan kualitas produk IKM</i>



No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
	Kreatif Prov. Jatim		
30.	UPTI Kayu Prov. Jatim	<ul style="list-style-type: none">• <i>Pelayanan industri perkayuan (Pendampingan SVLK, desain, finishing kayu)</i>	<i>Terlaksananya layanan Industri Perkayuan</i>
31.	UPT PSMB-LT Jember	<ul style="list-style-type: none">• <i>Pelayanan Uji Tar dan Nikotin Produk Industri Rokok</i>	<i>Terlaksananya layanan Uji Tar dan Nikotin</i>
32.	Institut Seni Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none">• <i>Pelayanan Pengembangan Produk Kerajinan</i>	<i>Meningkatkan kualitas produk IKM</i>
33.	Balai Besar Batik, dan Kerajinan Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none">• <i>Pelayanan Pelatihan Kerajinan</i>	<i>Terlaksananya pelayanan pengembangan industri kerajinan</i>
34.	Balai Besar Industri Agro	<ul style="list-style-type: none">• <i>Pelayanan HACCP bagi produk indsutri makanan olahan</i>• <i>Pelayanan Uji nutrisi Produk IKM</i>• <i>pelayanan sertifikasi SNI</i>	<i>Terlaksananya layanan produk higien/ bersih bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah</i>



No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
35.	PT. POS	<ul style="list-style-type: none">Layanan antar jemput pengiriman produk IKM	terlaksananya fasilitas antar jemput pengiriman produk IKM
36.	Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none">Peningkatan SDM IKM Batik melalui pelatihan berbasis kompetensi	Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bagi IKM Batik
37.	Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Keramik Nonlogam	<ul style="list-style-type: none">pengujian kualitas bahan baku genteng dan batu bata	Terlaksananya pengujian bahan baku genteng dan batu bata
38.	Dinas PUPR Kabupaten Magetan	<ul style="list-style-type: none">Pengujian kualitas produk paving	Terlaksananya pengujian produk paving
39.	DPMPSTSP	<ul style="list-style-type: none">Pelayanan Perizinan Berusaha	Terlaksananya perizinan berusaha sektor industri
40.	UPTI Pengembangan Mutu Produk dan Teknologi	Pelayanan pengembangan Mutu produk dan teknologi kreatif bagi IKM <ul style="list-style-type: none">	Meningkatkan kualitas produk IKM



No	Mitra Perangkat Daerah	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
	Kreatif Prov. Jatim		
41.	PT Sucofindo	pengujian kualitas bahan baku produk bahan bangunan	Terlaksananya pengujian bahan baku produk bahan bangunan
42.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual kemenkumham	pendaftaran merek	Terlaksananya penerbitan sertifikat merek bagi IKM
43.	Kementerian Perindustrian	Pembuatan akun SIINas	Terlaksananya pembuatan akun SIINas bagi IKM

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan, 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kolaborasi yang terjalin antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sinergi antara elemen-elemen pemerintahan daerah sangat penting, termasuk kerja sama antara perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebagai entitas yang dimiliki pemerintah daerah, BUMD memegang peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peran dan dukungan BUMD terhadap kinerja perangkat daerah meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan program, penyediaan infrastruktur atau sarana pendukung, serta keterlibatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. BUMD juga dapat berfungsi sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran yang lebih luas.

Berikut adalah dukungan BUMD terhadap pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan.

Tabel 2.10 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap Kinerja
1	PDAM	1. Partisipasi Pameran Hari Jadi Kabupaten 2. Pemasok Air Bersih 3. Menjalinkan kerja sama terkait tera ulang meter air	1. Membantu kelancaran kegiatan Pameran Hari Jadi 2. Meningkatkan ketersediaan



No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap Kinerja
			dan kualitas air bersih di Pasar Daerah 3. Kesesuaian ukuran
2	Bank Jatim	1. Partisipasi Pameran Hari Jadi Kabupaten 2. Permodalan pelaku usaha perdagangan 3. E-Retribusi Pasar	1. Membantu kelancaran kegiatan Pameran Hari Jadi 2. Kredit kepada pelaku usaha perdagangan 3. Terlaksananya layanan E-Retribusi Pasar
3	BPRS	1. Partisipasi Pameran Hari Jadi Kabupaten 2. Pemberian kredit ke Pedagang Pasar 3. <i>layanan Pembiayaan Permodalan bagi IKM</i>	1. Membantu kelancaran kegiatan Pameran Hari Jadi 2. Bantuan kredit ke pedagang Pasar 3. <i>Meningkatkan</i>



No	Nama BUMD	Bentuk Dukungan	Dukungan terhadap Kinerja
			<i>perkembangan usaha IKM</i>

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan, 2025

Tabel di atas mengilustrasikan kontribusi BUMD dalam mendukung kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan secara lebih spesifik. Kontribusi yang diberikan oleh BUMD tidak hanya berupa penyediaan sumber daya atau dukungan finansial, tetapi juga dalam bentuk kemitraan yang strategis untuk mewujudkan keberhasilan program-program daerah. Melalui kerjasama yang efektif dengan BUMD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, mempercepat pencapaian target-target kinerja, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antar daerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah



ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

Tabel 2.11 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dinkes Kabupaten Magetan	KKS Tatanan Pasar Sehat	Mewujudkan tatanan Pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat untuk mendukung program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) secara keseluruhan, serta menjamin keamanan pangan, meningkatkan kualitas hidup pedagang dan pembeli, dan memberdayakan komunitas Pasar untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan Pasar



No	Mitra Kerja Sama	Jenis Kerja Sama	Dukungan terhadap kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	BPOM Surabaya	Pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Pencegahan peredaran bahan pangan berbahaya di Pasar Daerah
3.	Pemerintah Desa	Kerjasama pemanfaatan lahan	Pemanfaatan aset Desa
4.	BSML Regional II Yogyakarta	Menjalin kerja sama terkait kalibrasi standar kemetrologian	Tertelusurnya standar ukuran
5.	Akademi Metrologi dan Instrumentasi	Menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan kemetrologian	Mencetak lulusan SDM kemetrologian
6.	Pusbin JFP	Menyelenggarakan diklat dan bimtek kemetrologian	Mengembangkan kompetensi individu
7.	Politeknik ATK Yogyakarta	<i>penyelenggaraan Pendidikan Pengolahan Kulit dan produk Kulit</i>	Peningkatan sumber daya manusia
8.	Dinkes Kabupaten Magetan	KKS Tatanan Industri Sehat	Mewujudkan kondisi lingkungan industri yang bersih

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan, 2025

Kerja sama daerah yang tercantum dalam tabel ini memainkan peran penting dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kerja sama ini memungkinkan PD untuk memperluas kapasitas dan cakupan layanan yang diberikan, baik melalui penyediaan sumber daya, pembagian tanggung jawab, maupun koordinasi dalam



pelaksanaan program-program prioritas. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja lebih efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian hasil yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan memiliki tantangan yang beragam, yang dapat mempengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.12 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Kurangnya Tempat Pembuangan Limbah	Belum tersedianya fasilitas pembuangan limbah yang sesuai standar	Belum adanya perencanaan tata kelola limbah yang terpadu



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		sehingga menimbulkan kendala dalam pengelolaan limbah usaha.	
			Koordinasi lintas sektor masih belum optimal
			Kesadaran pelaku usaha tentang pengelolaan limbah masih rendah
2.	Kurangnya pendataan yang sistematis tentang jumlah usaha perdagangan dan industri kecil menengah	Tidak adanya pemetaan yang jelas tentang jenis dan jumlah usaha, termasuk pedagang kaki lima	Sistem pendataan yang tidak terintegrasi
			Keterbatasan sumber daya untuk pemantauan lapangan
3.	Belum optimalnya Pemasaran Produk IKM	Pemasaran produk IKM masih terbatas dan belum	Promosi produk masih terbatas pada wilayah tertentu



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		memanfaatkan secara maksimal teknologi digital serta jejaring kemitraan.	
			Pemanfaatan teknologi digital belum maksimal
			Jejaring kemitraan dengan pasar modern dan platform daring masih lemah.
4.	Masih kurangnya pemenuhan persyaratan Perizinan Khususnya SIINas	kurangnya informasi yang diterima oleh pelaku Usaha khususnya pelaku industri	kurangnya informasi yang di dapat oleh masyarakat
			kurangnya sosialisasi dan pendampingan oleh pembina Indsutri Kecil Menengah (IKM)
			kurang memahaminya



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			pembina IKM akan pentingnya kelengkapan persyaratan perizinan
5.	Sulitnya Pedagang dalam Mengakses Pemasaran Secara Online	Pedagang masih mengalami kendala dalam memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produk sehingga jangkauan pasar menjadi terbatas.	Pemanfaatan teknologi digital oleh pedagang masih rendah
			Kurangnya pendampingan terkait strategi pemasaran online
5.	Belum tertatanya sistem zonasi pasar secara maksimal serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang Pasar yang sesuai standart	Penataan zonasi pasar yang belum sesuai standart	Penataan ruang dagang / zonasi pasar yang belum sesuai standart



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			Kurangnya kepatuhan dan kedisiplinan pedagang untuk mengikuti aturan zonasi yang telah ditetapkan
			Kurangnya sarana dan prasarana penunjang Pasar yang sesuai standart
6.	PKL Belum Menempati Tempat Berdagang Sesuai Peruntukan	Penataan pedagang kaki lima (PKL) belum berjalan sesuai rencana sehingga banyak pedagang masih menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan.	Belum optimalnya penerapan kebijakan penataan PKL
			Ketersediaan lokasi alternatif belum dimanfaatkan maksimal
			Tingkat kepatuhan pedagang terhadap



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			aturan masih rendah
7.	Sering terjadi fluktuasi harga	Distribusi barang pokok dan penting (Bapokting) belum stabil	Rantai pasok panjang, informasi harga belum terintegrasi menyeluruh, ketergantungan pasokal luar daerah
8.	Kelangkaan dan penyalahgunaan barang bersubsidi (pupuk, LPG 3 Kg, BBM)	Sistem distribusi belum efisien	Rantai pasok panjang, informasi harga belum terintegrasi menyeluruh, ketergantungan pasokal luar daerah
9.	UMKM lokal kesulitan bersaing karena keterbatasan modal, SDM, akses pasar, dan digitalisasi.	Kapasitas pelaku usaha rendah	Keterbatasan modal, keterampilan manajemen dan literasi digital rendah
10.	Pengawasan barang beredar dan metrologi legal belum optimal	Masih ditemukannya kecurangan takaran/label	Keterbatasan SDM pengawas, lemahnya penegakan aturan perdagangan dan metrologi legal



No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
11.	Produk unggulan daerah belum memiliki daya saing dan nilai tambah tinggi.	Nilai tambah produk lokal rendah	Kelemahan dalam desain, kemasan, branding, dan sertifikasi mutu
12.	Perlindungan konsumen masih rendah	Masyarakat sering dirugikan oleh barang tidak sesuai standar	Belum optimalnya sosialisasi, Konsumen kurang kritis, serta barang tanpa standar masih beredar

Sumber: Disperindag Kab. Magetan, 2025

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan didasarkan pada Potensi dan Permasalahan, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas



Perindustrian Provinsi Jawa Timur, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Magetan dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah. Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Decarbonization

Decarbonization adalah proses mengurangi atau menghilangkan emisi karbon dioksida (CO₂) dari berbagai sektor, sistem, dan kegiatan. Tujuan dari dekarbonisasi adalah untuk mengurangi efek pemanasan global yang disebabkan oleh CO₂, yang merupakan gas rumah kaca utama. Dekarbonisasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti:

1. Menggantikan sumber energi fosil dengan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hidro, dan geotermal sehingga dapat mengurangi emisi CO₂;
2. Meningkatkan efisiensi sistem energi, bangunan, dan peralatan dapat mengurangi konsumsi energi dan emisi CO₂;
3. Meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dan transportasi umum untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan emisi CO₂;
4. Mengumpulkan emisi CO₂ dari pembangkit listrik tenaga termal dan industri, lalu menyimpannya di bawah tanah atau menggunakan dalam produk seperti beton dapat mengurangi emisi;



5. Praktek-praktek seperti reboisasi, agroforestry, dan pertanian regeneratif yang dapat menyerap karbon dioksida dari atmosfer;
6. Menerapkan prinsip-prinsip ekonomi lingkungan yang lebih baik, seperti recycling, upcycling, dan pengurangan limbah, dapat mengurangi emisi manajemen limbah dan menghemat sumber daya baru;
7. Offsetting karbon dengan berinvestasi pada proyek-proyek yang mengurangi emisi gas rumah kaca lainnya, seperti reboisasi atau proyek energi terbarukan.

Dekarbonisasi sangat penting untuk mencapai tujuan global tentang pemanasan global, termasuk target Paris Agreement untuk membatasi pemanasan global lebih dari 2°C di atas tingkat sebelum era industri. Beberapa manfaat dekarbonisasi antara lain: mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas udara, menyempurnakan keamanan energi, menawarkan manfaat ekonomi dari investasi pada teknologi low-carbon, dan menciptakan lapangan kerja dalam sektor energi terbarukan. Namun, dekarbonisasi juga memiliki beberapa tantangan, seperti biaya awal yang lebih tinggi untuk mengembangkan teknologi low-carbon, kompleksitas dalam mengembangkan strategi dekarbonisasi yang efektif, dampak potensial pada sektor-sektor yang bergantung pada bahan bakar fosil, dan perlu kerjasama internasional dan koordinasi untuk mencapai tujuan global. Tuntutan global terhadap pengurangan emisi karbon mendorong sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Magetan untuk beradaptasi dengan penerapan energi ramah lingkungan, efisiensi energi, dan pemanfaatan teknologi produksi yang lebih bersih. Disperindag berperan dalam mendorong industri kecil menengah (IKM) untuk beralih ke



proses produksi yang ramah lingkungan serta mendukung perdagangan produk hijau yang memiliki daya saing global.

2. Green Development

Green development adalah proses pembangunan yang dilakukan dengan cara yang berkelanjutan, seimbang dan berkelimpahan, serta memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Tujuan dari pembangunan hijau adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Pembangunan hijau dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti:

- Menggunakan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, energi surya, atau energi angin;
- Meningkatkan kualitas udara, air, dan tanah dengan mengurangi polusi dan limbah.
- Menggunakan bahan baku yang tersedia di daerah setempat untuk mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan baku impor;
- Meningkatkan produksi pertanian yang berkelanjutan dengan menggunakan praktik-praktik sustainable farming, seperti agroforestry dan organic;
- Meningkatkan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti jalan raya yang menggunakan material yang berkelanjutan, stasiun listrik yang menggunakan energi terbarukan, atau bangunan yang berdesain hijau;
- Mengelola limbah dengan cara yang berkelanjutan, seperti recycling, upcycling, atau biodegradasi;



- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses kepada sumber daya alam, pendidikan, dan pelatihan.

Green development memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menghadapi perubahan iklim, meningkatkan ekonomi lokal dengan meningkatkan penggunaan bahan baku lokal serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjadi mandiri. Peningkatan kesadaran konsumen global terhadap produk ramah lingkungan mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan untuk memfasilitasi industri kecil agar mengarah pada produksi yang ramah lingkungan, hemat energi, dan sesuai standar keberlanjutan. Hal ini juga dapat memperkuat daya saing produk lokal di pasar internasional.

3. Diversifikasi Rantai Suplai

Diversifikasi rantai suplai adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kestabilan rantai suplai mereka dengan cara menambahkan lebih banyak sumber suplai dan supplier. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada satu supplier tunggal dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi gangguan atau keterlambatan pengiriman. Manfaat Diversifikasi Rantai Suplai:

1. Diversifikasi rantai suplai dapat mengurangi risiko kehilangan sumber suplai karena gangguan atau keterlambatan pengiriman;



2. Diversifikasi rantai suplai dapat meningkatkan kestabilan rantai suplai dan memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi walaupun ada gangguan;
3. Diversifikasi rantai suplai dapat meningkatkan fleksibilitas perusahaan untuk menjawab perubahan pasar atau penawaran;
4. Diversifikasi rantai suplai dapat meningkatkan kompetensi perusahaan dalam memilih supplier yang tepat dan mengelola hubungan dengan mereka;
5. Diversifikasi rantai suplai dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya.

Diversifikasi rantai suplai adalah strategi yang efektif untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kestabilan rantai suplai. Namun, perlu diingat bahwa diversifikasi rantai suplai juga menimbulkan beberapa tantangan seperti biaya tinggi, kompleksitas manajemen, kualitas produk, dan komunikasi. Dinamika global menunjukkan pentingnya diversifikasi rantai pasok agar sektor industri dan perdagangan tidak bergantung pada satu sumber bahan baku atau satu pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan perlu berperan dalam memperluas jejaring distribusi dan akses pasar produk unggulan daerah, sekaligus memperkuat kemitraan lintas wilayah.

4. Automation, Internet of Things and Digitalization

Internet of Things (IoT) merupakan suatu konsep pengembangan teknologi yang mengintegrasikan perangkat fisik dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas internet sehingga memungkinkan terjadinya proses pengumpulan, pertukaran, serta analisis data secara otomatis dan real-time. Kehadiran IoT tidak hanya mendukung efisiensi operasional, tetapi juga membuka



peluang inovasi dalam sektor industri dan perdagangan, khususnya melalui pemanfaatan data yang lebih akurat. Transformasi digital menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing sektor perdagangan dan industri. Isu ini relevan untuk mendorong IKM mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital, baik dalam proses produksi maupun pemasaran melalui platform daring agar produk lokal mampu menembus pasar regional, nasional, hingga global.

2.2.2.2 Isu Nasional

A. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Isu strategis dalam penguatan perekonomian daerah salah satunya terletak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini menuntut adanya pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya dalam penguasaan keterampilan teknis serta kemampuan kewirausahaan yang mampu mendorong kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat.

B. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030, yang menuntut kontribusi nyata dari berbagai sektor, antara lain energi, transportasi, dan industri. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam pengurangan emisi sekaligus penguatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim guna meminimalkan risiko serta dampak yang ditimbulkannya terhadap pembangunan berkelanjutan.

C. Pencemaran Lingkungan



Pencemaran lingkungan merupakan tantangan yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat serta kelestarian ekosistem. Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia dengan jumlah mencapai lebih dari 3,2 juta ton pada tahun 2018. Selain itu, permasalahan polusi udara maupun air juga menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Dengan kondisi tersebut, penanganan pencemaran lingkungan perlu ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

2.2.2.3 Isu Regional

Isu regional dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merujuk pada tantangan dan prioritas yang dihadapi di level provinsi. Isu ini dapat mencakup masalah seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, pengelolaan sumber daya alam, peningkatan infrastruktur, atau penguatan sektor ekonomi unggulan lokal. Identifikasi isu regional dilakukan dengan memperhatikan kondisi spesifik daerah, hasil evaluasi capaian pembangunan, serta kebutuhan masyarakat setempat.

1. Masih terdapat beberapa faktor penghambat perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) salah satunya adalah masih terdapat kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan dunia usaha;
2. Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif; dan
3. Rendahnya penggunaan teknologi tinggi pada industri.

2.2.2.4 Potensi Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu



sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan antara lain:

1. Industri pengolahan makanan, dan kerajinan kulit menunjukkan ruang ekspansi yang besar.
2. Potensi SDM lokal—khususnya generasi muda di wilayah pedesaan

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Magetan dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:



Tabel 2.13 Perumusan Isu Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi SDM lokal— khususnya generasi muda di wilayah pedesaan	Belum optimalnya Pemasaran Produk IKM	Masih kurangnya pengembangan produk IKM	<i>Automation, Internet of Things and Digitalization</i>	Peningkatan kualitas sumber melalui pendidikan dan pelatihan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya dalam penguasaan keterampilan teknis serta kemampuan kewirausahaan daya manusia	Pemanfaatan infrastruktur TIK belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan kegiatan sektor produktif	Optimalisasi Pemasaran produk IKM melalui pemanfaatan media sosial
	PKL Belum Menempati Tempat Berdagang Sesuai Peruntukan				Pengembangan Program-Program Ekonomi Dan Kewirausahaan	Penataan lokasi berdagang bagi PKL agar tertib, aman, dan sesuai peruntukan



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD <i>(1)</i>	Permasalahan PD <i>(2)</i>	Isu KLHS yang Relevan dengan PD <i>(3)</i>	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD <i>(7)</i>
			Global <i>(4)</i>	Nasional <i>(5)</i>	Regional <i>(6)</i>	
Pasar Daerah	Belum Tertatanya Fasilitas Pasar Sesuai dengan Penggunaannya		Kurangnya ketersediaan prasarana dan sarana penunjang pasar ber-SNI	Minimnya sarana dan prasarana penunjang Pasar Daerah. Tercatat hanya terdapat 112 Pasar Daerah yang ber-SNI di Indonesia tahun 2025	Minimnya Presentase Pasar Rakyat yang memiliki sarana dan prasarana penunjang hanya sebesar 30% dan 5% yang menyediakan fasilitas belanja daring (cashless) serta kecilnya presentase Pasar Daerah yang berkualitas SNI, yaitu hanya terdapat 7 dari total 2.574 Pasar Daerah di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2025	Penataan, revitalisasi, dan peningkatan infrastruktur pasar daerah menuju pasar sehat dan ber-SNI

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan, 2025



Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan disajikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemasaran produk IKM melalui pemanfaatan media sosial;
2. Penataan lokasi berdagang bagi PKL agar tertib, aman, dan sesuai peruntukan; dan
3. Penataan, revitalisasi, dan peningkatan infrastruktur pasar daerah menuju pasar sehat dan ber-SNI

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN





BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Magetan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan”

Adapun misi Kabupaten Magetan dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:



Misi 1. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Andal dan Berdaya Saing Kuat

Misi ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan sumber daya manusia Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, terampil, dan mampu bersaing di era global. Esensinya terletak pada pembentukan SDM yang tidak hanya menguasai kompetensi teknis sesuai kebutuhan pasar kerja, tetapi juga memiliki daya adaptasi tinggi, kreativitas, serta nilai-nilai integritas. Misi ini bertujuan menghasilkan tenaga kerja produktif yang dapat menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing daerah di kancah nasional maupun internasional.

Misi 2. Mengembangkan Sektor Pertanian, Mendorong Hilirisasi Produk Unggulan berbasis UMKM, Koperasi untuk Menetapkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan

Misi ini mencerminkan strategi pembangunan ekonomi daerah yang berfokus pada penguatan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian, dengan mendorong hilirisasi produk unggulan untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan UMKM dan koperasi serta tetap memperhatikan keberlanjutan kelestarian lingkungan. Misi ini berfokus pada penciptaan rantai nilai yang terintegrasi dari hulu ke hilir, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha kecil, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal secara berkelanjutan serta menciptakan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor.

Misi 3. Membangun Birokrasi Pemerintahan yang Profesional, Responsif, Adaptif, dan Transparan

Misi ini mencerminkan upaya transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel melalui penguatan kapasitas aparatur, sistem digital, dan prinsip-prinsip good



governance . Misi ini berfokus pada reformasi birokrasi dapat menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, adaptif dengan perubahan zaman, transparan, mendorong partisipasi publik, sekaligus mempercepat pembangunan daerah melalui pelayanan yang efisien dan bebas dari praktik korupsi.

Misi 4. Meningkatkan Kesejahteraan dengan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Sosial, dan Pembangunan Wilayah Perdesaan

Misi ini mencerminkan pendekatan holistik dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat secara produktif, penguatan sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan. Esensinya terletak pada penciptaan kemandirian masyarakat melalui program pelatihan keterampilan, akses modal, dan pendampingan usaha, didukung oleh kebijakan perlindungan sosial yang inklusif serta pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal.

Misi 5. Peningkatan Daya Tarik Investasi, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, Perluasan Lapangan Kerja, dan Menumbuhkan Kewirausahaan untuk Mengurangi Pengangguran

Misi ini mencerminkan strategi komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dengan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi investasi, mengembangkan potensi ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi, serta memperluas kesempatan kerja melalui penguatan kewirausahaan. Fokus dari misi ini ada pada sinergi antara pembukaan lapangan pekerjaan baru, peningkatan kompetensi SDM, dan optimalisasi sektor unggulan berbasis kreativitas dan keunikan lokal, sehingga tidak hanya menarik minat investor tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjadi pelaku usaha mandiri.



Misi 6. Membangun Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah

Misi ini mencerminkan komitmen pemerataan pembangunan di Kabupaten Magetan khususnya wilayah utara-selatan melalui penyediaan infrastruktur dasar dan strategis yang menghubungkan wilayah terpencil dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Misi ini berfokus pada pendekatan afirmatif untuk menciptakan konektivitas wilayah, aksesibilitas layanan publik, dan peningkatan mobilitas masyarakat, sehingga mampu mendorong distribusi pembangunan yang lebih adil dan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah. Dengan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, air bersih, serta teknologi digital di daerah tertinggal, misi ini bertujuan menciptakan kesetaraan peluang ekonomi, mempercepat pertumbuhan wilayah perdesaan, dan memperkuat integrasi nasional melalui pemerataan akses terhadap fasilitas publik dan pusat-pusat ekonomi.

Misi 7. Membangun Kehidupan Masyarakat yang "Guyub Rukun", Aman, Tentram, Berasaskan Nilai Agama dan Budaya serta Menjaga Harmoni Lingkungan Hidup dan Mendorong Pembangunan Ekonomi Hijau

Misi ini mencerminkan pendekatan holistik dalam mewujudkan tatanan sosial yang harmonis dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual, kearifan lokal, dan kelestarian ekologis sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Misi ini berfokus pada penciptaan masyarakat yang hidup rukun melalui penguatan toleransi beragama dan pelestarian budaya serta menjaga keseimbangan alam dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau. Dengan demikian, misi ini bertujuan membentuk ekosistem sosial-ekonomi yang berkelanjutan, di mana kemajuan material berjalan selaras dengan ketahanan sosial, keamanan masyarakat, dan pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang.



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan berperan dalam mendukung misi ke 2 dari RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang Perindust	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan meningkatkan pengembangan		PDRB Sektor Perdagangan	2.637.306,77 juta rupiah	2.747.010,89 juta rupiah	2838.317760	2937658882	3040476942	3146893635	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
rian dan Perdagangan Sasaran RPJMD : Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan	industry kecil menengah									
			PDRB Sektor Industri	962.770 ,45 juta rupiah	1.928.26 1,61 juta rupiah	1.976.47 2,25	2.025.88 4,06	2.076.53 1,16	2.128.44 4,44	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkat nya pertumbuh an usaha perdaganga n	Persenta se Pertumb uhan Usaha Perdaga- ngan	7,16 %	7,17%	7,18 %	7,19 %	7,20 %	7,21 %	
		Meningkat nya Pertumbuh an Industri Kecil Menengah	Persenta se Pertumb uhan Industri Kecil	0,201 %	0,202 %	0,203 %	0,204%	0,205 %	0,206%	



NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Menengah							
		Meningkatnya kepuasan layanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	84,79	84,80	84,81	84,82	84,83	84,84	

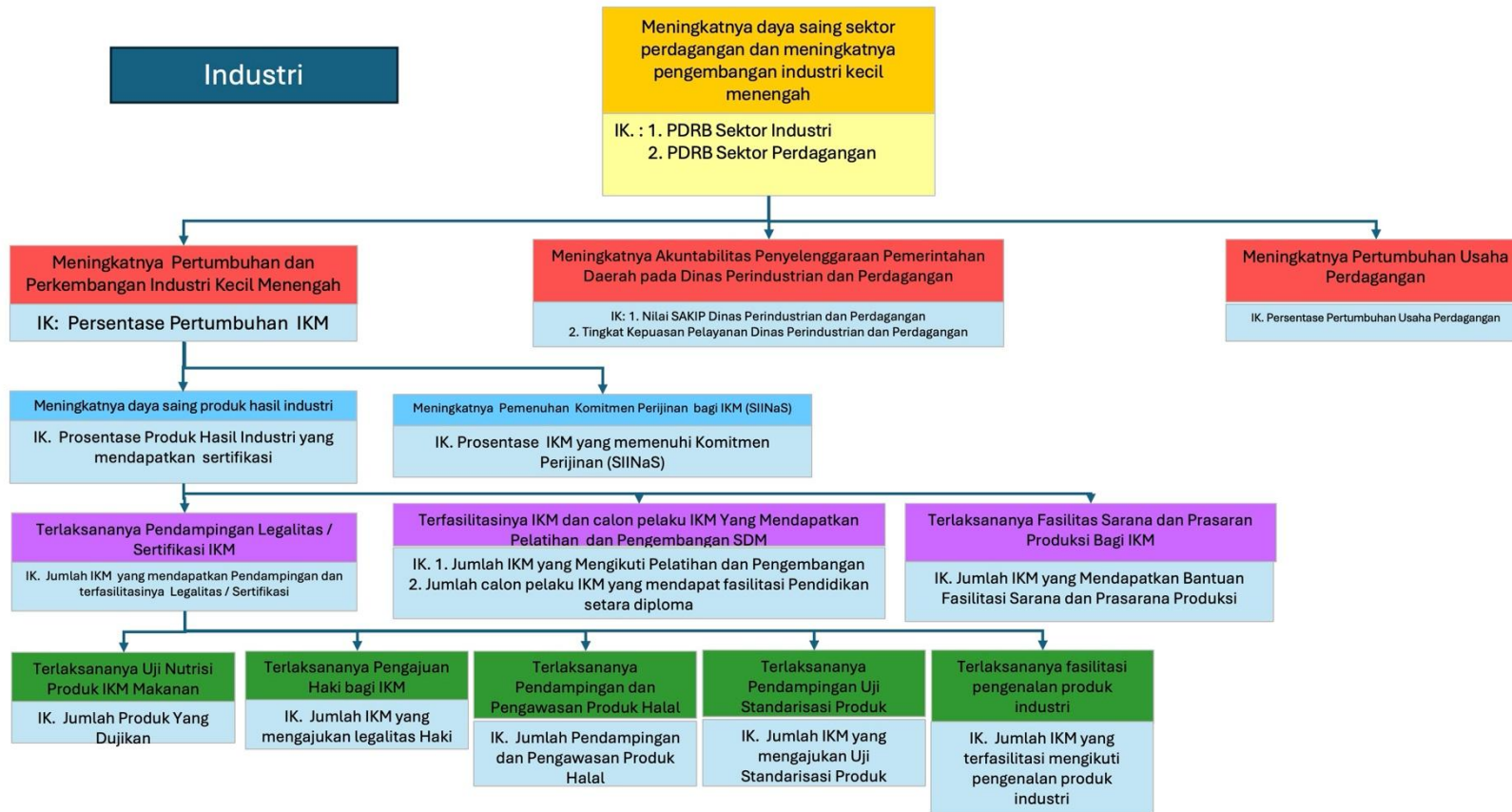


NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Indeks kepuasan masyarakat	79,90	80	80,10	80,20	80,30	80,40	

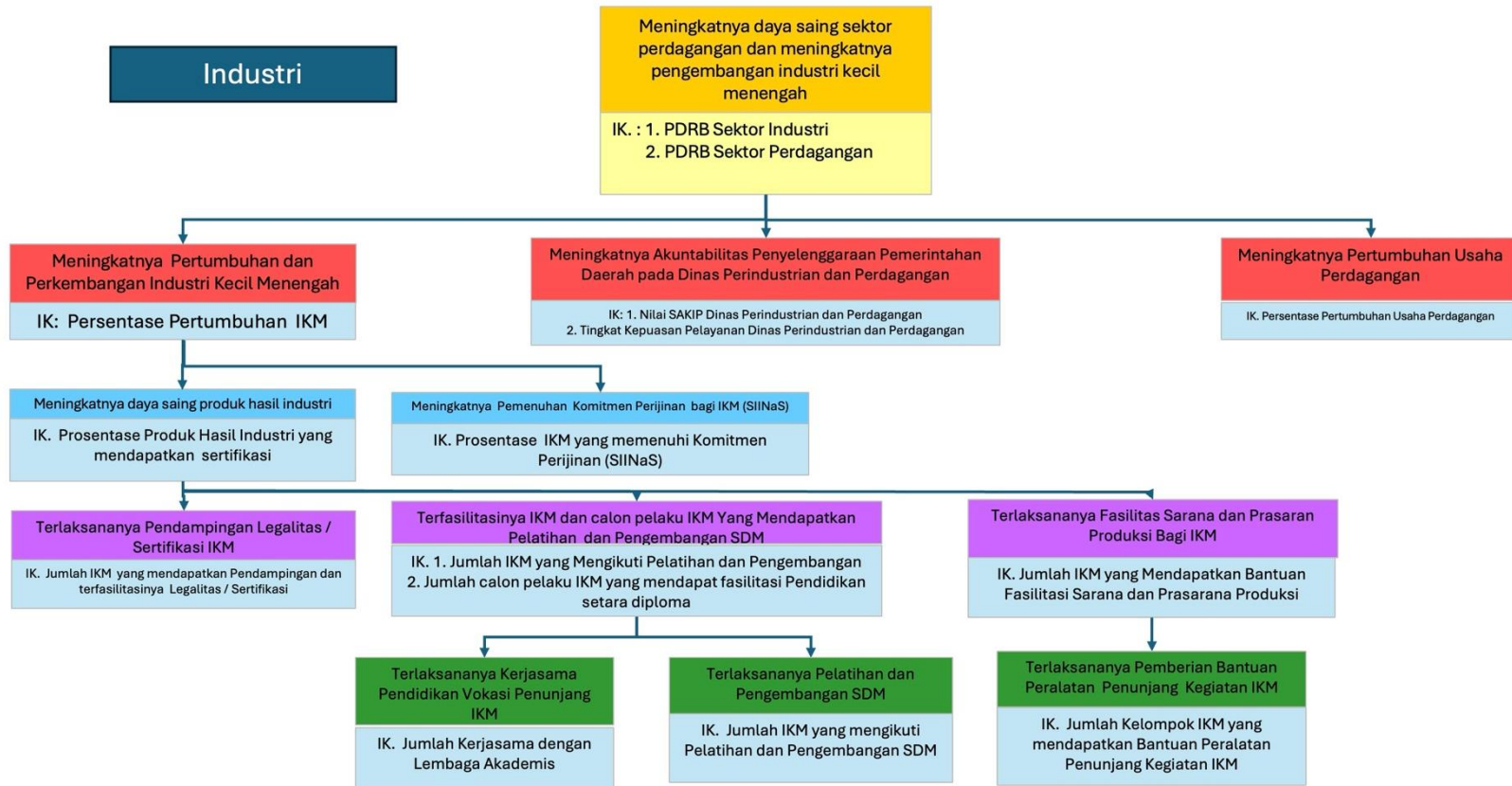
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan, 2025



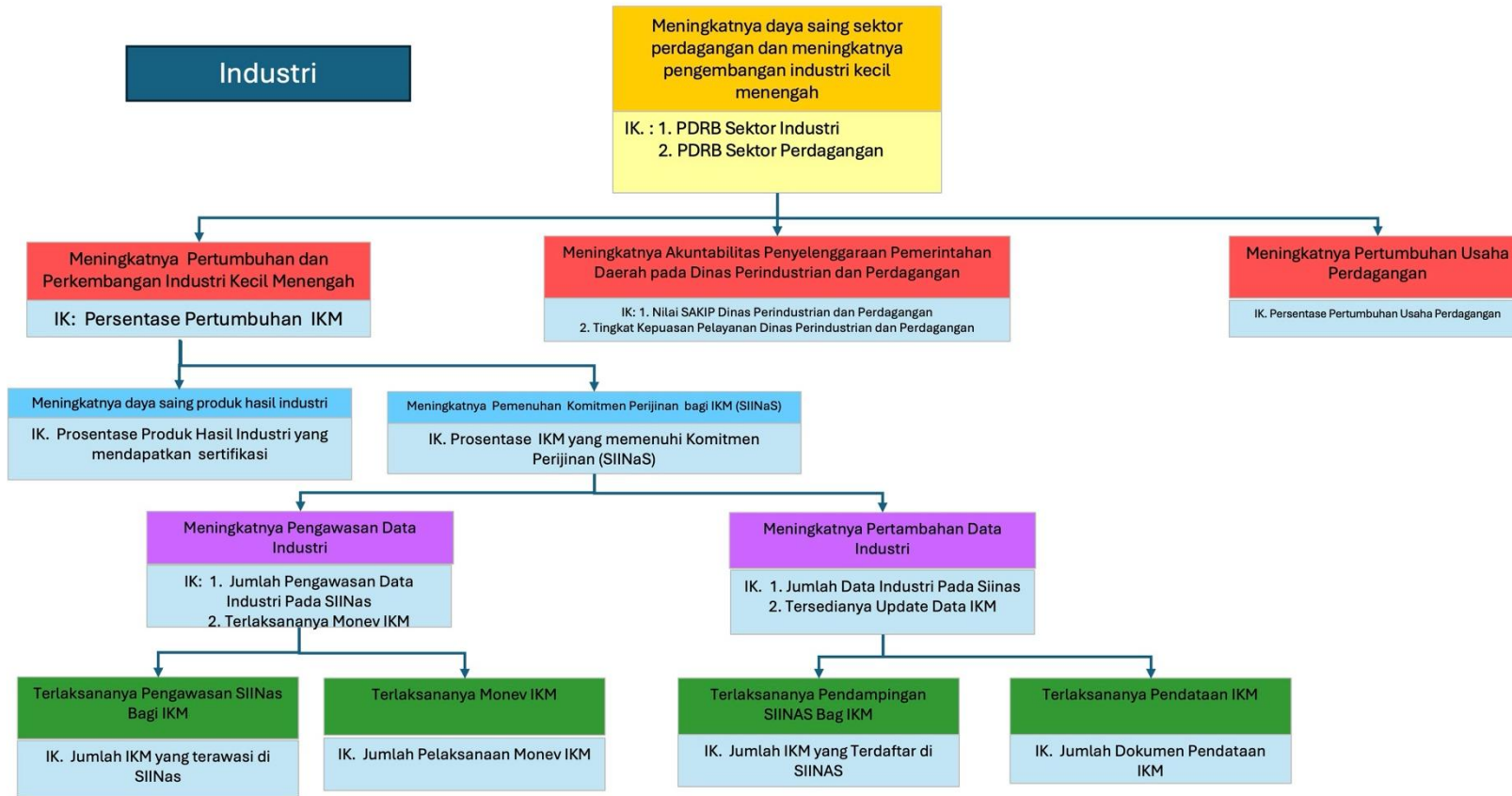
Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.



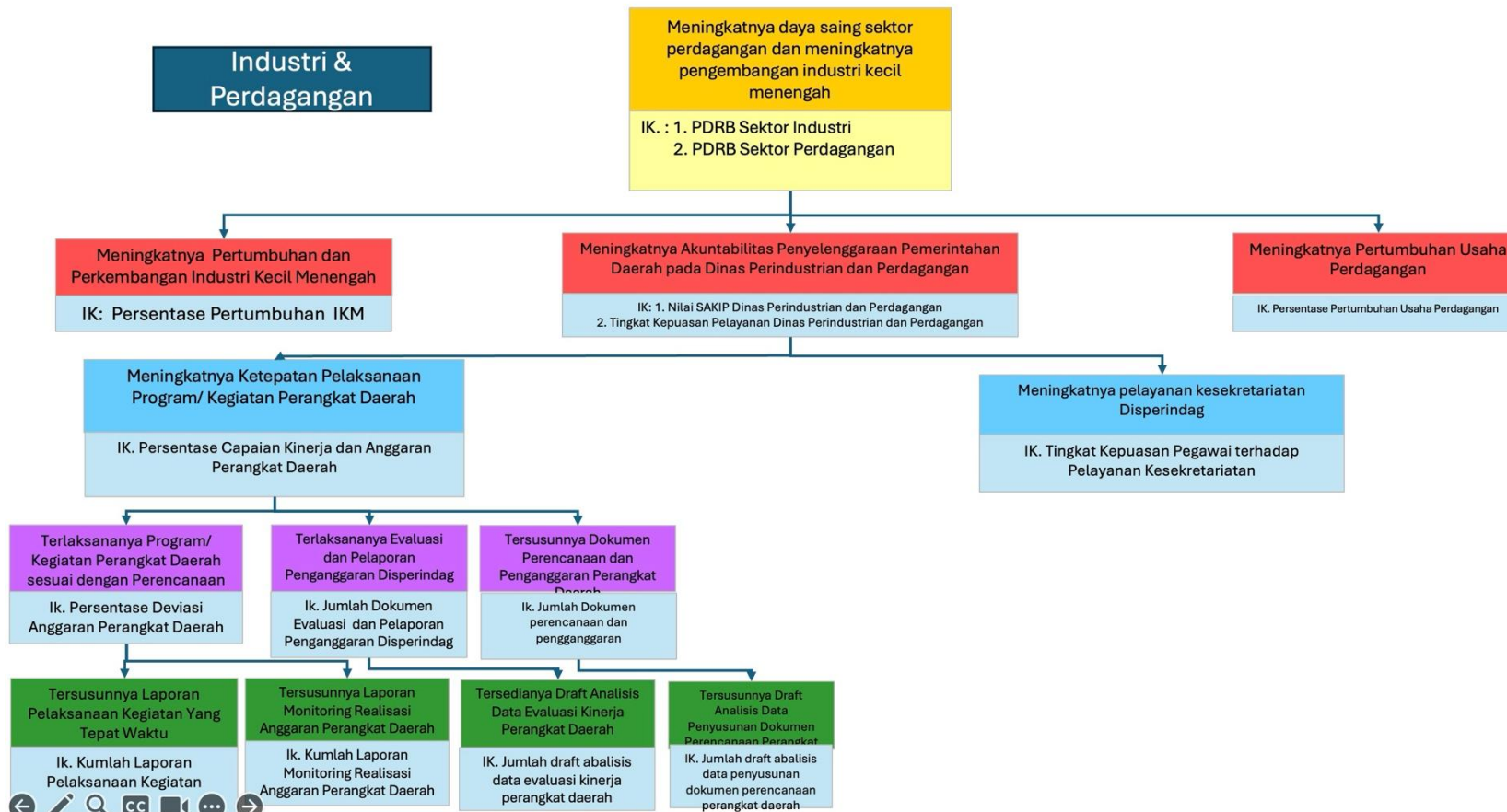
Gambar 3. 1 Pohon Kinerja Urusan Industri



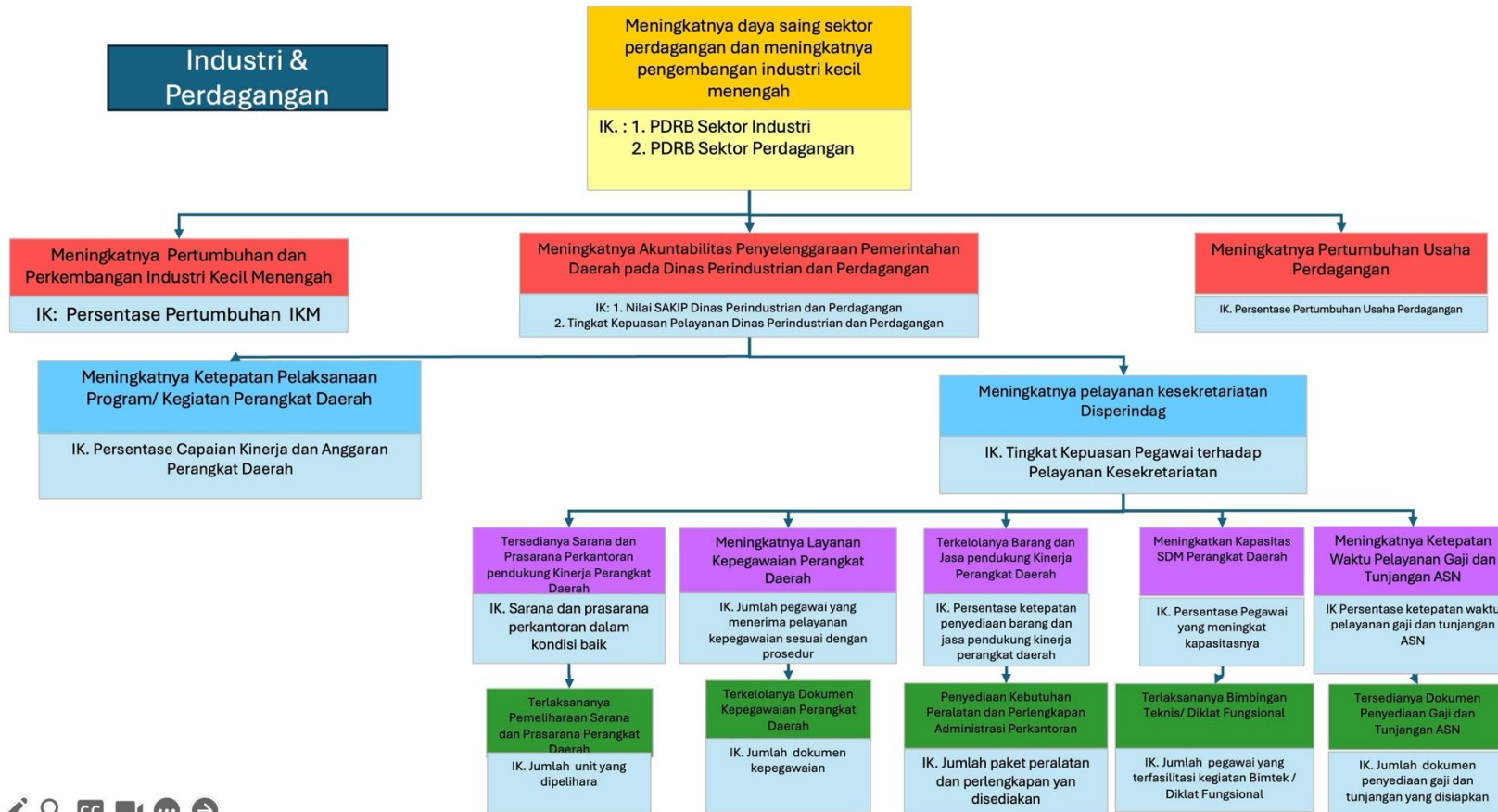
Gambar 3. 2 Pohon Kinerja Urusan Industri



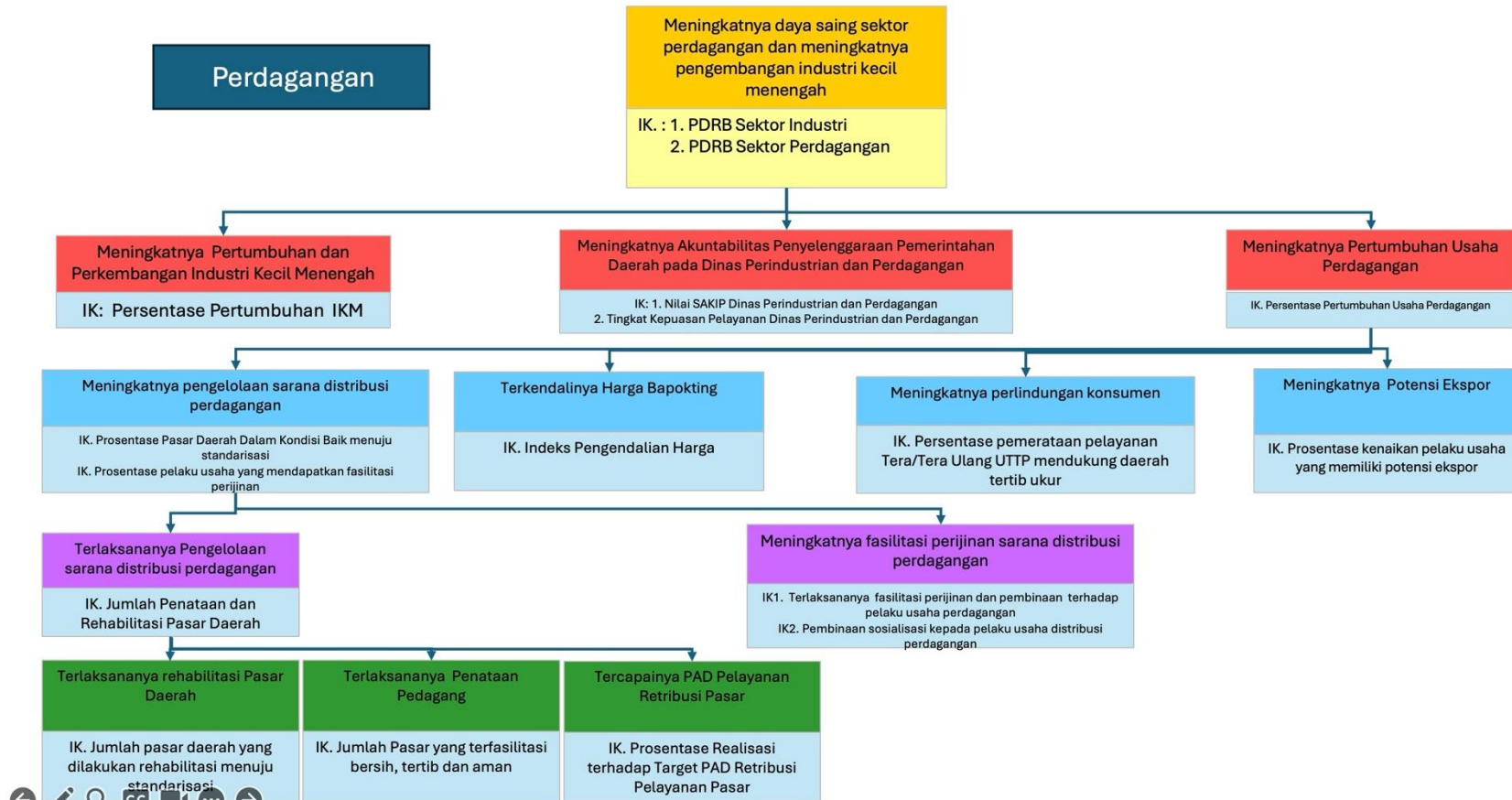
Gambar 3. 3 Pohon Kinerja Urusan Industri



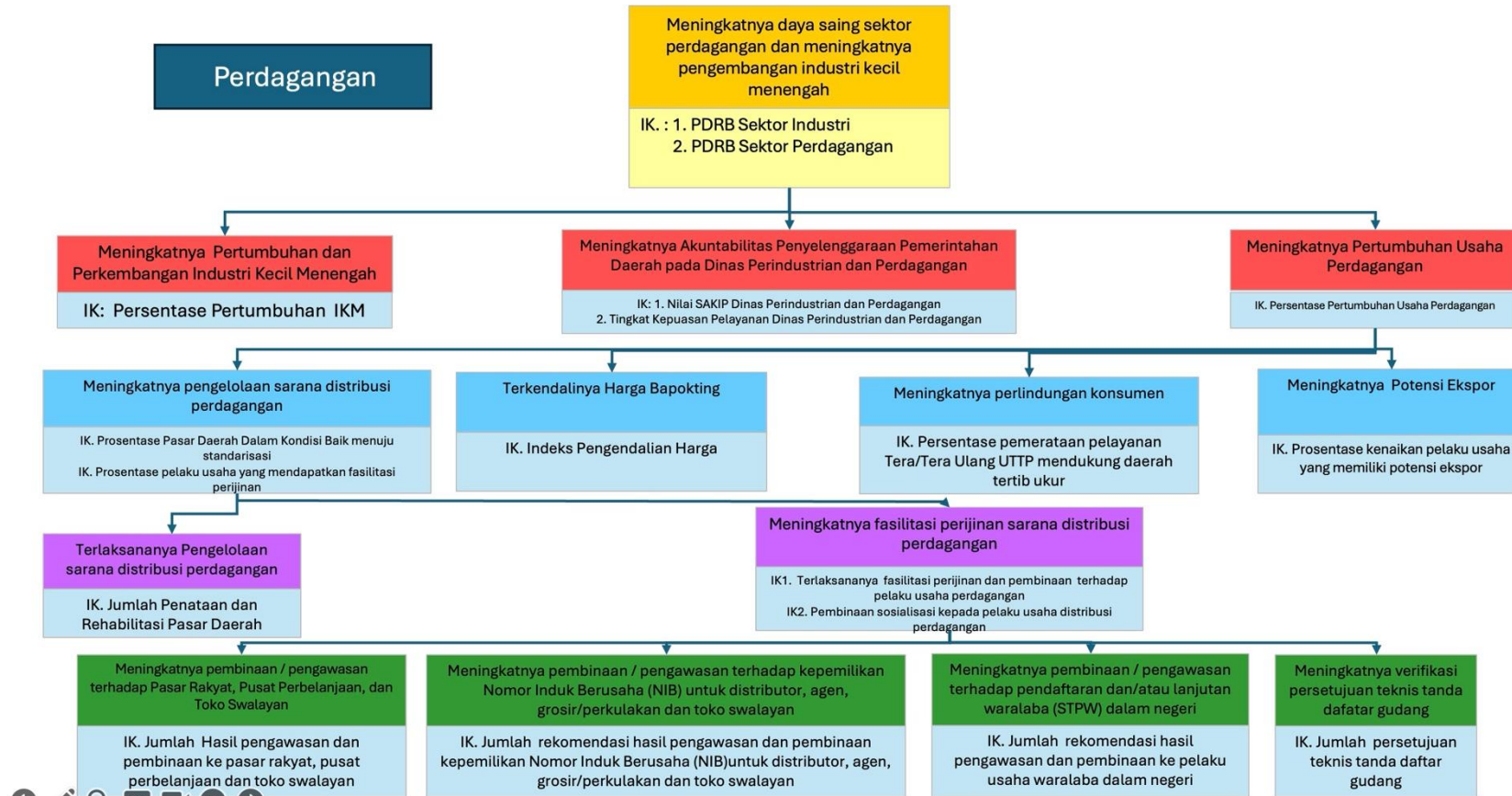
Gambar 3. 4 Pohon Kinerja Urusan Industri dan Perdagangan



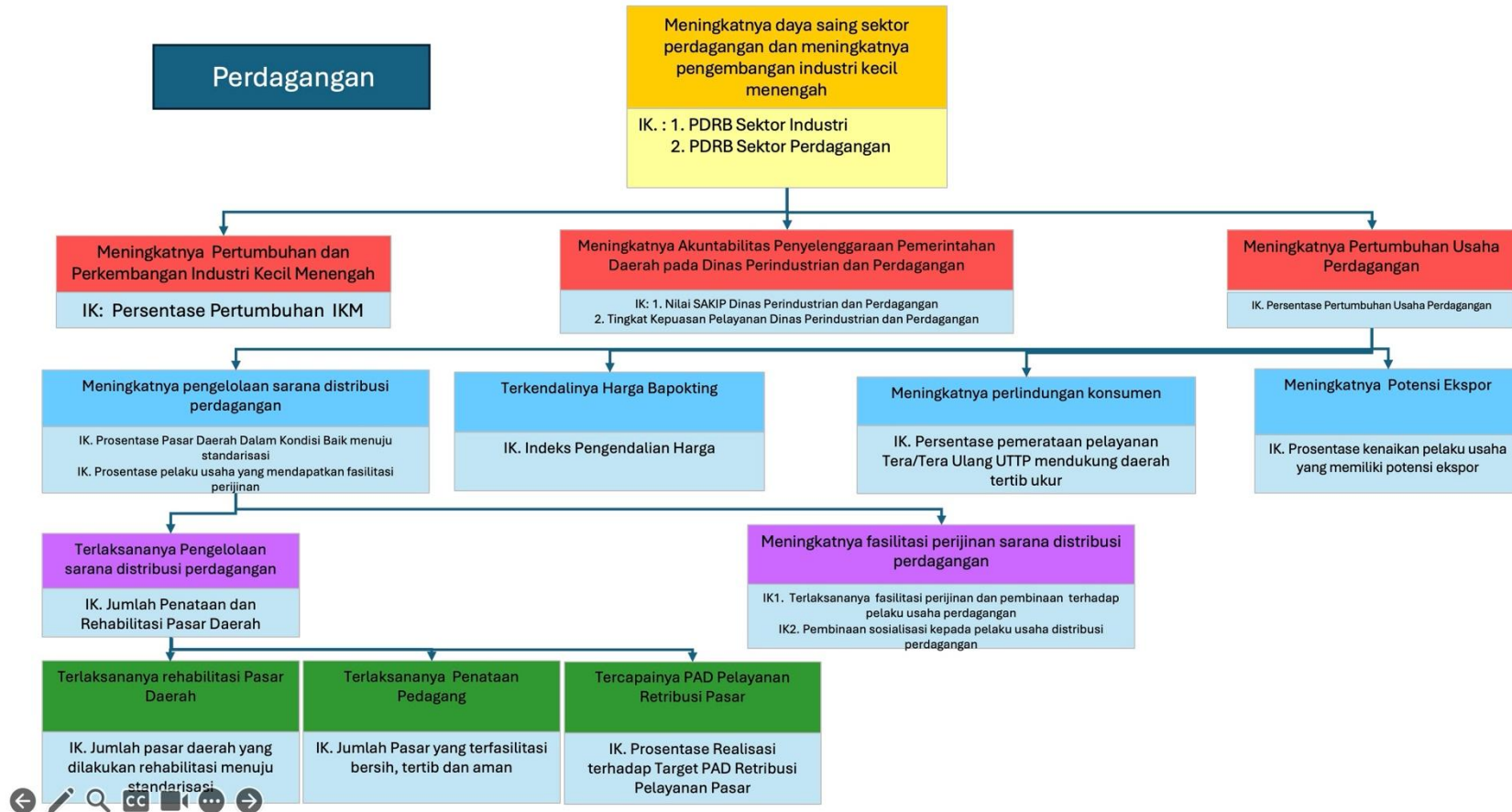
Gambar 3. 5 Pohon Kinerja Urusan Industri dan Perdagangan



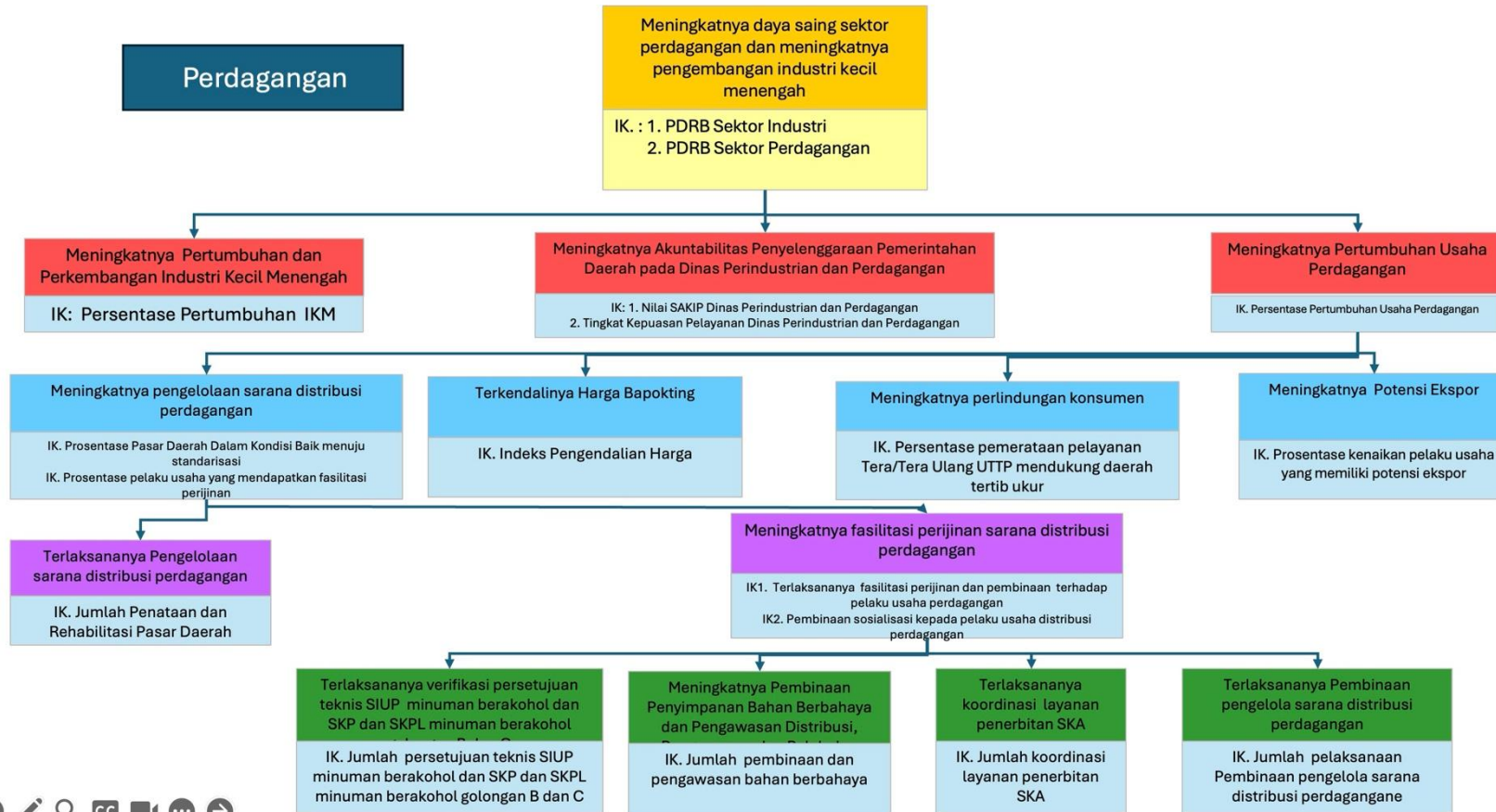
Gambar 3. 6 Pohon Kinerja Urusan Perdagangan



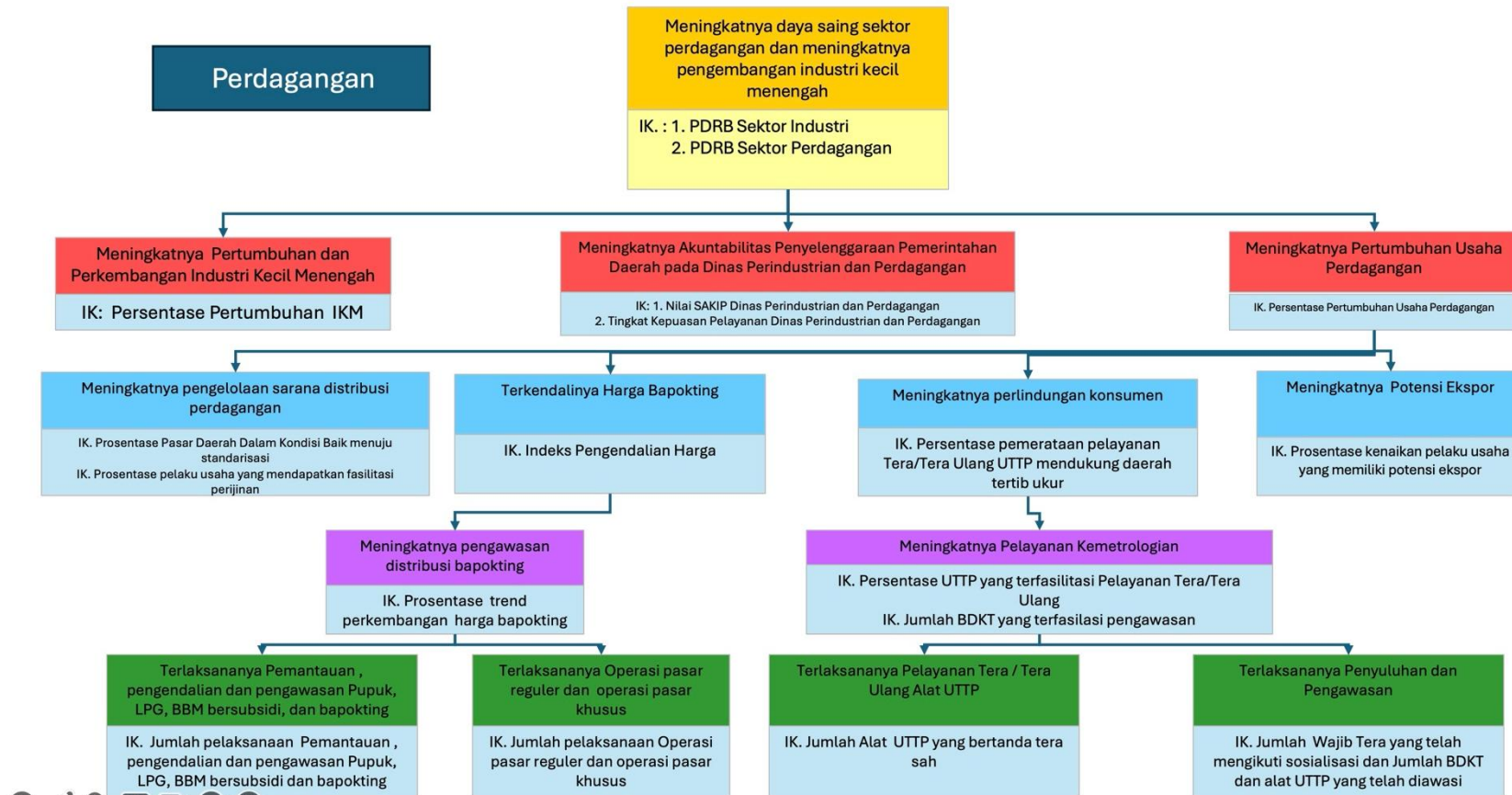
Gambar 3. 7 Pohon Kinerja Urusan Perdagangan



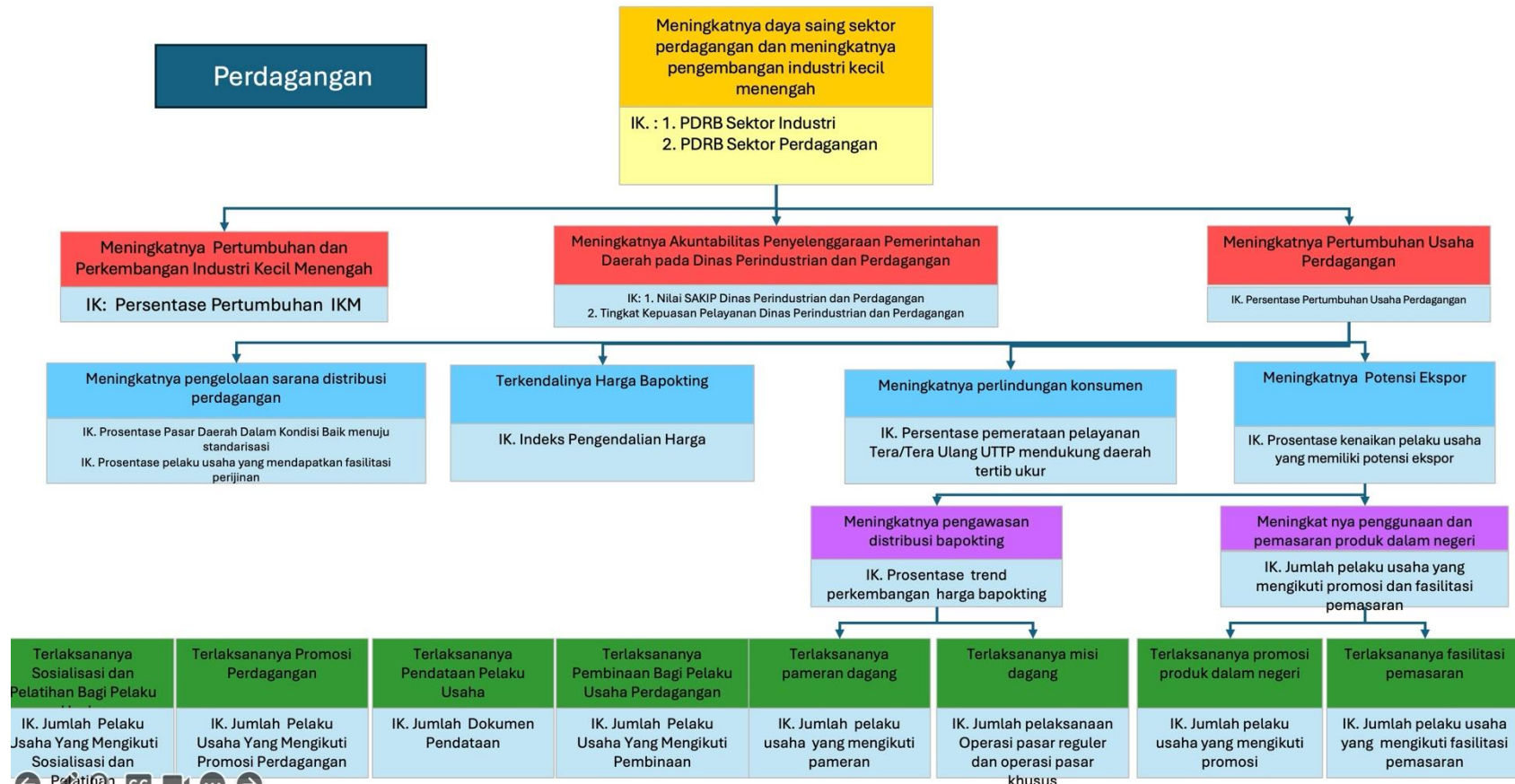
Gambar 3. 8 Pohon Kinerja Urusan Perdagangan



Gambar 3. 9 Pohon Kinerja Urusan Perdagangan



Gambar 3. 10 Pohon Kinerja Urusan Perdagangan



Gambar 3. 11 Pohon Kinerja Urusan Perdagangan



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.1.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, yang meliputi antara lain:

Tabel 3.2 Penentuan Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Masih Kurangnya Tempat Pembuangan Limbah	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	Pengembangan sarana pengelolaan limbah terpadu yang ramah lingkungan serta mendorong kerjasama industri dalam pemanfaatan limbah menjadi produk bernilai tambah.
2	Kurangnya pendataan yang sistematis tentang jumlah	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	Membangun sistem database terpadu berbasis digital untuk pendataan, pemetaan,



No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
	usaha perdagangan dan industri kecil menengah		dan pembaruan data IKM dan perdagangan secara berkala.
3	Belum optimalnya Pemasaran Produk IKM	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	Peningkatan promosi dan perluasan akses pasar melalui pameran, <i>marketplace</i> digital, serta fasilitasi branding dan sertifikasi produk unggulan IKM.
4	Masih kurangnya pemenuhan persyaratan Perizinan Khususnya SIINas	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil	Peningkatan pendampingan, bimbingan teknis, dan percepatan layanan perizinan industri berbasis sistem digital agar IKM mudah memenuhi standar SIINas.
5	Sulitnya Pedagang dalam Mengakses Pemasaran Secara Online	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Peningkatan literasi digital, pelatihan e-commerce, serta kerjasama dengan platform <i>marketplace</i> untuk memperluas jaringan pemasaran pedagang.



No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
6	Belum tertatanya sistem zonasi pasar secara maksimal serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang Pasar yang sesuai standart	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Melakukan penataan, revitalisasi/rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur Pasar Daerah yang sesuai standart menuju Pasar Sehat dan ber-SNI
6	PKL Belum Menempati Tempat Berdagang Sesuai Peruntukan	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Penataan zonasi PKL secara partisipatif, penyediaan lokasi yang representatif, serta penguatan kelembagaan PKL agar sesuai regulasi dan mendukung kenyamanan masyarakat.
7	Sering terjadi fluktuasi harga	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Penguatan sistem informasi harga berbasis digital, serta peningkatan koordinasi distribusi barang kebutuhan pokok.
8	Kelangkaan dan penyalahgunaan barang	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan	Peningkatan pengawasan distribusi barang bersubsidi



No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
	bersubsidi (pupuk, LPG 3 Kg, BBM)	Usaha Perdagangan	dengan sistem digitalisasi serta memperkuat koordinasi dengan aparatus penegak hukum.
9	UMKM lokal kesulitan bersaing karena keterbatasan modal, SDM, akses pasar, dan digitalisasi.	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Fasilitasi akses pembiayaan (KUR, koperasi, BPR daerah), peningkatan kapasitas SDM, serta inkubasi bisnis dan digitalisasi UMKM lokal.
10	Pengawasan barang beredar dan metrologi legal belum optimal	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Penguatan pengawasan barang beredar melalui intensifikasi sidak, modernisasi alat ukur metrologi legal, serta peningkatan peran UPTD Metrologi.
11	Produk unggulan daerah belum memiliki daya saing dan nilai tambah tinggi.	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Pengembangan hilirisasi produk unggulan daerah, fasilitasi sertifikasi mutu (SNI, halal, PIRT), serta penguatan branding dan akses pasar ekspor.



No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
12	Perlindungan konsumen masih rendah	Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Meningkatkan literasi konsumen, memperkuat lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM), serta penguatan pengawasan barang beredar.

3.1.2 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:



Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan Dasar dan Penataan Sistem (penataan pasar, pendataan IKM/UMKM, perbaikan sarana prasarana perdagangan dan industri)	Peningkatan Kapasitas dan Aksesibilitas (pembinaan IKM/UMKM, perluasan akses digital marketing, penerapan sistem pendataan terintegrasi)	Pengembangan Daya Saing dan Kualitas (standarisasi produk, sertifikasi mutu, fasilitasi kemitraan usaha, peningkatan promosi dagang)	Diversifikasi dan Inovasi Produk (pengembangan produk unggulan daerah, inovasi berbasis teknologi, ekspansi jejaring pasar regional-nasional)	Penguatan Ekspor dan Keberlanjutan (peningkatan akses pasar ekspor, konsolidasi branding produk daerah, keberlanjutan sistem perdagangan dan industri yang berdaya saing global)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan, 2025



3.1.3 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)
	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan			
Urusan Perindustrian				
1.			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			Kabupaten (RPIK) yang berorientasi pada hilirisasi, digitalisasi, dan keberlanjutan lingkungan.	
2.		Standarisasi dan Sertifikasi Produk barang dan jasa UKM dalam meningkatkan daya saing produk	Penyederhanaan dan percepatan layanan perizinan industri secara online, serta fasilitasi sertifikasi produk (SNI, halal, PIRT).	
3.			Optimalisasi pendampingan proses izin usaha industri kecil dan menengah melalui layanan terpadu digital.	
4.			Memperkuat sistem pengawasan	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			dan pelayanan izin sesuai zonasi industri serta mempercepat penerbitan izin berbasis online	
5.			Pengawasan Perizinan Sektor Industri melalui pencatatan, pengawasan, dan sebagai prasyarat fasilitas lainnya bagi IKM.	
Urusan Perdagangan				
1.			Revitalisasi pasar daerah sesuai SNI, peningkatan kualitas manajemen pengelola pasar, dan digitalisasi layanan pasar rakyat.	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
2.			Penguatan sistem registrasi dan pelaporan gudang berbasis online serta pemantauan distribusi barang.	
3.			Penyederhanaan layanan pendaftaran waralaba dan penguatan pembinaan terhadap pelaku usaha waralaba lokal.	
4.			Penerapan sistem perizinan ketat dan pengawasan distribusi minuman beralkohol sesuai regulasi daerah.	
5.			Intensifikasi pengawasan	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			bahan berbahaya, pelabelan sesuai standar, serta kampanye kesadaran konsumen.	
6.			Peningkatan koordinasi pengawasan perdagangan kayu, pelaporan digital, dan kepatuhan aturan kehutanan.	
7.			Fasilitasi percepatan layanan SKA berbasis elektronik (e-SKA) untuk mendukung peningkatan ekspor daerah.	
8.			Peningkatan infrastruktur distribusi	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			(gudang, pasar induk, depo logistik) dan integrasi dengan sistem rantai pasok nasional.	
9.		Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan berbasis kompetensi, perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan sector potensial dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan akses masyarakat terhadap	Pelatihan manajemen distribusi berbasis digital dan peningkatan kelembagaan pengelola distribusi.	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
		peluang kerja yang inklusif dan berkelanjutan.		
10.		Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok	Optimalisasi monitoring stok & distribusi barang pokok melalui Sistem Informasi Harga dan Barang Penting.	
11.		Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok	Penguatan <i>dashboard</i> pemantauan harga berbasis <i>real time</i> di pasar tradisional dan modern.	
12.		Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok	Rutin melaksanakan operasi pasar, bazar murah, dan subsidi ongkos distribusi pada	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			masa krisis harga.	
13.		Menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok	Digitalisasi distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi melalui sistem kartu tani	
14.			Fasilitasi pameran dagang, dan <i>marketplace</i> digital untuk produk unggulan daerah.	
15.			Branding produk ekspor unggulan daerah dengan promosi terpadu lintas kabupaten/kota dan internasional.	
16.			Modernisasi peralatan	



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
			metrologi legal, peningkatan intensitas sidak, dan penguatan peran UPT Metrologi.	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB
KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN





BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.



**Tabel 4.1 Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang perdagangan dan perindustrian RPJMD : Meningkatnya	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan dan				PDRB Sektor Industri		
	Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah				PDRB Sektor Perdagangan		
		Meningkatnya Pertumbuhan Perkembangan Industri Kecil			Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan			Meningkatnya Kualitas Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian		Prosentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	
				Terlaksananya Pendampingan Legalitas /Sertifikasi IKM	Persentase IKM yang mendapat fasilitas pembinaan, peralatan, dan perizinan	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam	perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
				Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustria n dalam rangka	Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				<p>usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi</p>	<p>penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustria n dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi</p>	<p>Submission Risk Base Approach (OSS RBA)</p>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				kewenangan pemerintah pusat	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		
			Meningkatnya Pemanfaatan		Tersedianya Informasi Industri Secara	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			n Informasi Industri		Lengkap, Akurat, dan Terkini		
				Meningkatnya Pengawasan Data Industri	Persentase IKM agro dan IKM non agro yang dibina dan diberikan bantuan peralatan produksi	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Monev IKM			
				Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
				Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		
			Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	
				Terfasilitasinya IKM yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembangan	Persentase perkembangan pelaku usaha	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				SDM serta Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Produksi Bagi IKM	industry agro dan non agro		
				Terlaksananya Pendidikan Vokasi Penunjang IKM			
				Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
				Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk	Jumlah pend	Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota			
		Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan			Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan		
			Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien		Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terlaksananya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terlaksananya Penataan Pedagang dan Tercapainya PAD Pelayanan Redistribusi Pasar	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Terlaksananya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pembinaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
				Terlaksananya Pembinaan Pengelola Sarana	Jumlah Dokumen Hasil	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Distribusi Perdagangan	Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Fasilitasi Perijinan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan	Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Penting di Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		
				Terlaksananya Fasilitasi Perijinan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha Perdagangan	Persentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Terpantau	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
				Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					dalam Sistem Informasi Perdagangan		
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan	Jumlah laporan dan jenis barang	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan	yang dipantau		
				Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Meningkatnya Kemudahan Proses		Persentase Izin Usaha Perdagangan	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Perizinan dan Pendaftaran Berusaha		yang Difasilitasi		
				Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang sudah berizin	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	
				Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat,	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
				Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen,	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha	Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	(NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	
				Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pelaku	Persentase Pemenuhan Komitmen Perolehan STPW	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				usaha perdagangan			
				Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	
				Verifikasi persyaratan sebagai Proses	Jumlah dokumen yang di	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi	Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					secara elektronik		
				Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan	Prosentase Jumlah Pelaku Usaha Pengecer dan	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				terhadap pelaku usaha perdagangan	Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Langsung Minum di Tempat	
				Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		
				Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk	Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				<p>dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</p>	<p>Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha</p>	<p>Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C</p>	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Terintegrasi Secara Elektronik		
				Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan	Persentase Peredaran Barang Tidak Layak Konsumsi Terpantau	Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Sub Kegiatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan	Persentase Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	
				Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
			Meningkatnya Tertib Niaga dan Mutu Produk		Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pelayanan Kemetrolgian	Persentase UTP yang ditera	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
				Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
				Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya Nilai Ekspor Barang		Nilai Ekspor Barang	Program Pengembangan Ekspor	
				Meningkatnya Pertumbuhan Potensi Ekspor Daerah	Persentase Pelaksanaan Pameran	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
			Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		Prosentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
				Meningkatnya Penggunaan dan	Persentase Penggunaan dan	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pemasaran Produk Dalam Negeri	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
				Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk	Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan, dan Jasa Akomodasi	dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		
		Meningkatnya kepuasan layanan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah			Tingkat Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
			Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan		Kepuasan ASN Disperindag terhadap pelayanan kesekretariatan Disperindag	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Disusun Tepat Waktu		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					mesteran SKPD		
				Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Tersedianya Laporan	Jumlah Laporan Pengelolaan	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Pengelolaan Retribusi Daerah	Retribusi Daerah		
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan	Jumlah barang milik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Barang Milik Daerah	daerah yang dipelihara	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Tangga yang Disediakan		
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
					Undangan yang Disediakan		
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan, 2025



Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya:



Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Outcome: Meningkatny a kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	75%	75,00	162.508 .350	75,50	136.500 .000	76,00	160.500 .000	76,50	174.000 .000	77,00	190.000 .000	77,50	202.500 .000	1 4
Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan Output: Terlaksananya fasilitasi perijinan	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah berizin		75%	94.285. 300	75%	20.000. 000	75%	24.000. 000	75%	28.000. 000	75%	30.000. 000	75%	35.000. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan															
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1 Dokumen	89.982. 000	1 Dokumen	10.000. 000	1 Dokumen	12.000. 000	1 Dokumen	14.000. 000	1 Dokumen	15.000. 000	1 Dokumen	17.500. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Baseline</i> 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Output: Terlaksananya pembinaan / pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan															



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik Output: Terlaksananya pembinaan / pengawasan terhadap kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen,	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik		1 Laporan	4.303.300	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	14.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	17.500.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Baseline</i> 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
grosir/perkul akan dan toko swalayan															



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang Output: Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan	Persentase jumlah pelaku usaha perdagangan yang sudah mengajukan izin TDG		75%	5.275.000	75%	10.000.000	75%	12.000.000	75%	14.000.000	75%	15.000.000	75%	17.500.000	
Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang Output: Terlaksananya verifikasi persetujuan teknis tanda daftar gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		1 Dokumen	5.275.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	14.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	17.500.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri Output: Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan	Persentase pemenuhan komitmen perolehan STPW		75%	7.429.600	75%	20.000.000	75%	24.000.000	75%	28.000.000	75%	30.000.000	75%	35.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Output: Terlaksananya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		1 Dokum en	3.550.1 00	1 Dokum en	10.000. 000	1 Dokum en	12.000. 000	1 Dokum en	14.000. 000	1 Dokum en	15.000. 000	1 Dokum en	17.500. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik Output: Terlaksananya pembinaan / pengawasan terhadap pendaftaran dan/atau lanjutan waralaba (STPW) dalam negeri	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik		1 Dokum en	3.879.5 00	1 Dokum en	10.000. 000	1 Dokum en	12.000. 000	1 Dokum en	14.000. 000	1 Dokum en	15.000. 000	1 Dokum en	17.500. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat Output: Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan	Prosentase jumlah pelaku usaha pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan C melalui sistem pelayanan perizinanberusaha a terintegrasi secara elektronik		75%	4.261.500	75%	15.000.000	75%	17.000.000	75%	17.000.000	75%	20.000.000	75%	20.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Output: Terlaksananya verifikasi persetujuan teknis SIUP minuman beralkohol dan SKP dan SKPL minuman beralkohol golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1 Dokumen	2.167.300	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C Output: Terlaksananya verifikasi persetujuan teknis SIUP minuman beralkohol dan SKP dan SKPL minuman beralkohol golongan B dan C	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		1 Dokumen	2.094.200	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Output: Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan	Persentase peredaran barang tidak layak konsumsi yang terpantau		75%	48.026.150	75%	65.000.000	75%	73.500.000	75%	77.000.000	75%	80.000.000	75%	80.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya Output: Terlaksananya Pembinaan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya		8 Laporan	26.325. 400	4 Laporan	35.000. 000	4 Laporan	38.500. 000	4 Laporan	38.500. 000	5 Laporan	40.000. 000	5 Laporan	40.000. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Output: Terlaksananya Pembinaan Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)		8 Laporan	21.700. 750	1 Laporan	30.000. 000	1 Laporan	35.000. 000	1 Laporan	38.500. 000	1 Laporan	40.000. 000	1 Laporan	40.000. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/K ota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) Output: Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan	Persentase jumlah penerbitan Surat Keterangan Asal		50%	6.500.000	50%	6.500.000	50%	10.000.000	50%	10.000.000	50%	15.000.000	50%	15.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Output: Terlaksananya koordinasi layanan penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal		1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	6.500.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Outcome: Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	85%	85,00	6.719.349.701	85,50	3.149.000.000	85,60	6.115.705.250	85,70	6.752.275.775	85,80	7.447.503.353	85,90	8.207.253.688	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Output: Terlaksananya Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persentase peningkatan sarana distribusi		85%	6.350.1 52.201	85%	3.149.0 00.000	85%	6.115.7 05.250	85%	6.752.2 75.775	85%	7.447.5 03.353	85%	8.207.2 53.688	
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Output: Terlaksananya rehabilitasi Pasar Daerah	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		2 Unit	5.529.5 45.701	7 Unit	2.239.0 00.000	5 Unit	5.040.7 05.250	5 Unit	5.544.7 55.775	5 Unit	6.099.2 53.352	5 Unit	6.709.1 78.687	
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Output: Terlaksananya Penataan Pedagang dan Tercapainya PAD	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		21 Unit	820.606 .500	24 Unit	750.000 .000	24 Unit	825.000 .000	24 Unit	907.500 .000	24 Unit	998.250 .000	24 Unit	1.098.0 75.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pelayanan Retribusi Pasar															
Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Output: Terlaksananya Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persentase Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan		85%	369.197 .500	85%	160.000 .000	85%	250.000 .000	85%	300.000 .000	85%	350.000 .000	85%	400.000 .000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Output: Terlaksananya Pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		3 Dokum en	369.197 .500	2 Dokum en	160.000 .000	2 Dokum en	250.000 .000	2 Dokum en	300.000 .000	2 Dokum en	350.000 .000	2 Dokum en	400.000 .000	
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Outcome: Meningkatny a kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	-	10%	309.724 .250	10%	364.500 .000	10%	460.000 .000	10%	520.000 .000	10%	550.000 .000	10%	555.000 .000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Output: Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan	Persentase ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting di tingkat kabupaten/kota		75%	2.858.800	75%	65.000.000	75%	10.000.000	75%	15.000.000	75%	15.000.000	75%	15.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Baseline</i> 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Output: Terlaksananya Pemantauan, pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi, dan bapokting	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		1 Laporan	2.858.800	1 Laporan	6.500.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Pengendalian Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya fasilitasi perijinan sarana distribusi perdagangan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan	Persentase barang kebutuhan pokok dan penting yang terpantau		100%	257.601.650	100%	305.000.000	100%	390.000.000	100%	445.000.000	100%	475.000.000	100%	480.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Baseline</i> 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Pemantauan, pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi, dan bapokting	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		3 Laporan	30.516.000	3 Laporan	40.000.000	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Baseline</i> 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		52 Laporan	17.190. 350	52 Laporan	30.000. 000	52 Laporan	40.000. 000	52 Laporan	45.000. 000	52 Laporan	45.000. 000	52 Laporan	50.000. 000	
Output: Terlaksananya pemantauan, pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi, dan bapokting															



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya Operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		6 Laporan	209.895 .300	8 Laporan	235.000 .000	8 Laporan	300.000 .000	8 Laporan	350.000 .000	8 Laporan	380.000 .000	8 Laporan	380.000 .000	
Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya fasilitas perijinan sarana distribusi perdagangan	Jumlah laporan jenis barang yang dipantau		3 Laporan	49.263. 800	3 Laporan	53.000. 000	3 Laporan	60.000. 000	3 Laporan	60.000. 000	3 Laporan	60.000. 000	3 Laporan	60.000. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
dan pembinaan terhadap pelaku usaha perdagangan															
Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Output: Terlaksananya Pemantauan, pengendalian dan pengawasan Pupuk, LPG, BBM bersubsidi, dan bapokting	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		3 Laporan	49.263. 800	3 Laporan	53.000. 000	3 Laporan	60.000. 000	3 Laporan	60.000. 000	3 Laporan	60.000. 000	3 Laporan	60.000. 000	
Program Pengembangan Ekspor Barang Output: Nilai Ekspor Barang	Nilai Ekspor Barang	-	1.075.0 00.000	91.019. 500	1.100.0 00.000	84.000. 000	1.200.0 00.000	200.000 .000	1.300.0 00.000	210.000 .000	1.400.0 00.000	225.000 .000	1.500.0 00.000	22.500. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Output: Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase pelaksanaan pameran		90%	91.019.500	90%	84.000.000	90%	200.000.000	90%	210.000.000	90%	225.000.000	90%	225.000.000	
Sub Kegiatan Pameran Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal Output: Terlaksananya pameran dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		15 Pelaku Usaha	71.699.500	10 Pelaku Usaha	45.000.000	10 Pelaku Usaha	150.000.000	10 Pelaku Usaha	150.000.000	10 Pelaku Usaha	165.000.000	10 Pelaku Usaha	165.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Output: Terlaksananya misi dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		8 Pelaku Usaha	19.320. 000	4 Pelaku Usaha	39.000. 000	4 Pelaku Usaha	50.000. 000	4 Pelaku Usaha	60.000. 000	4 Pelaku Usaha	60.000. 000	4 Pelaku Usaha	60.000. 000	
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Outcome: Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	80%	80%	106.881 .850	81%	195.000 .000	82%	250.000 .000	83%	275.000 .000	84%	302.500 .000	85%	332.750 .000	
Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Output: Terlaksananya Pelayanan Kemetrologian	Persentase UTP yang ditera		80%	106.881 .850	81%	195.000 .000	82%	250.000 .000	803%	275.000 .000	84%	302.500 .000	85%	332.750 .000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Output: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		20.000 Unit	81.829. 850	15000 Unit	145.000 .000	15000 Unit	200.000 .000	15000 Unit	220.000 .000	15000 Unit	242.000 .000	15000 Unit	266.200 .000	
Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal Output: Terlaksananya Penyuluhan dan Pengawasan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		350 Orang	25.052. 000	250 Orang	50.000. 000	250 Orang	100.000 .000	250 Orang	110.000 .000	250 Orang	121.000 .000	250 Orang	133.100 .000	
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Outcome: Meningkatkan penggunaan dan pemasaran	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ dilaksanakan	80%	80,00	296.317 .300	80,50	355.000 .000	81,00	445.000 .000	81,50	445.000 .000	82,00	500.000 .000	82,50	500.000 .000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
produk dalam negeri															
Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Output: Meningkatnya pertumbuhan potensi ekspor daerah	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		80,00	296.317.300	80,50	355.000.000	81,00	445.000.000	81,50	445.000.000	82,00	500.000.000	82,50	500.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya promosi produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		30 UMKM	270.434 .600	30 UMKM	315.000 .000	30 UMKM	400.000 .000	30 UMKM	400.000 .000	30 UMKM	450.000 .000	30 UMKM	450.000 .000	
Sub Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Output: Terlaksananya fasilitas pemasaran	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		25 UMKM	25.882. 700	20 UMKM	40.000. 000	20 UMKM	45.000. 000	20 UMKM	45.000. 000	20 UMKM	50.000. 000	20 UMKM	50.000. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaia n pada Tahun Awal Peren canaa n (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/K ota Outcome: Meningkatny a kualitas layanan kesekretariat an pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Indeks Kepuasan Layanan kesekretariatian	77,78	77,78	10.794. 235.657	77,8	11.305. 647.460	77,82	12.889. 597.550	77,84	13.841. 627.304	77,86	14.885. 680.035	77,88	16.127. 528.037	1 4
	Persentase Capaian Kinerja Dan Anggaran	95	95		95,07		95,14		95,21		95,28		95,35		
Kegiatan Perencanaan, Penggangan , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Perencanaan, Penggangan , dan Evaluasi Kinerja	Jumlah dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu		13 Dokum en	70.550. 750	14 Dokum en	84.000. 000	14 Dokum en	92.500. 000	14 Dokum en	103.000 .000	14 Dokum en	115.000 .000	14 Dokum en	126.500 .000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Perangkat Daerah															14
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokum en	45.858. 250	7 Dokum en	55.000. 000	7 Dokum en	60.500. 000	7 Dokum en	67.000. 000	7 Dokum en	75.000. 000	7 Dokum en	82.500. 000	
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Output: Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Lapora n	24.692. 500	7 Lapora n	29.000. 000	7 Lapora n	32.000. 000	7 Lapora n	36.000. 000	7 Lapora n	40.000. 000	7 Lapora n	44.000. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah		100%	6.629.173.557	100%	6.709.088.681	100%	7.379.997.550	100%	8.118.027.305	100%	8.929.980.035	100%	9.823.028.038	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Output: Tersedianya Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		62 Orang/Bulan	6.624.452.107	62 Orang/Bulan	6.702.088.681	62 Orang/Bulan	7.379.997.550	62 Orang/Bulan	8.118.027.305	62 Orang/Bulan	8.929.980.034	62 Orang/Bulan	9.823.028.038	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		2 Laporan	4.721.450	2 Laporan	7.000.000	2 Laporan	7.700.000	2 Laporan	8.500.000	2 Laporan	9.500.000	2 Laporan	10.500.000	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	7.000.000	4 Dokumen	7.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Output: Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					4 Laporan	7.000.000	4 Laporan	7.000.000	4 Laporan	7.000.000	4 Laporan	7.000.000	4 Laporan	7.000.000
Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		13 Dokumen	189.166.750	13 Dokumen	165.000.000	13 Dokumen	181.500.000	13 Dokumen	200.000.000	13 Dokumen	221.000.000	13 Dokumen	243.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah		1 Dokum en	173.619 .950	1 Dokum en	150.000 .000	1 Dokum en	165.000 .000	1 Dokum en	181.500 .000	1 Dokum en	200.000 .000	1 Dokum en	220.000 .000	
Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Output: Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Retribusi	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		12 Lapora n	15.546. 800	12 Lapora n	15.000. 000	12 Lapora n	16.500. 000	12 Lapora n	18.500. 000	12 Lapora n	21.000. 000	12 Lapora n	23.000. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai prosedur		64 Orang	49.617. 850	64 Orang	46.750. 000	64 Orang	59.000. 000	64 Orang	64.500. 000	64 Orang	70.500. 000	64 Orang	77.500. 000	
Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Output: Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						12 Dokum en	7.000.0 00	12 Dokum en	7.000.0 00	12 Dokum en	7.000.0 00	12 Dokum en	7.000.0 00	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Output: Terlaksananya Bimbingan Teknis	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		62 Orang	9.477.3 00	50 Orang	22.250. 000	50 Orang	25.000. 000	50 Orang	27.500. 000	50 Orang	30.500. 000	50 Orang	34.000. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Implementasi Peraturan Perundang- Undangan															
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Output: Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		2 Orang	40.140. 550	2 Orang	24.500. 000	2 Orang	27.000. 000	2 Orang	30.000. 000	2 Orang	33.000. 000	2 Orang	36.500. 000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Output: Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah		97 Paket	334.947 .950	97 Paket	411.500 .000	97 Paket	430.800 .000	97 Paket	476.600 .000	97 Paket	528.200 .000	97 Paket	580.500 .000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun											Ket .	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target		Pagu
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Output: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	28.500. 000	4 Paket	28.500. 000	4 Paket	28.500. 000	4 Paket	31.400. 000	4 Paket	35.000. 000	4 Paket	38.000. 000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	137.523 .750	5 Paket	120.000 .000	5 Paket	120.000 .000	5 Paket	132.000 .000	5 Paket	145.200 .000	5 Paket	160.000 .000	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Output: Tersedianya Peralatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		3 Paket	16.875. 000	3 Paket	17.000. 000	3 Paket	18.700. 000	3 Paket	21.000. 000	3 Paket	23.000. 000	3 Paket	25.000. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rumah Tangga															
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	22.660. 450	12 Paket	37.000. 000	12 Paket	40.700. 000	12 Paket	45.000. 000	12 Paket	50.000. 000	12 Paket	55.000. 000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output: Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3 Paket	13.806. 700	3 Paket	20.000. 000	3 Paket	22.000. 000	3 Paket	24.200. 000	3 Paket	27.000. 000	3 Paket	30.000. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		40 Dokum en	58.875. 000	40 Dokum en	59.000. 000	40 Dokum en	57.900. 000	40 Dokum en	65.000. 000	40 Dokum en	73.000. 000	40 Dokum en	80.000. 000	
Sub Kegiatan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Output: Tersusunnya laporan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		24 Lapora n	56.707. 050	24 Lapora n	130.000 .000	24 Lapora n	143.000 .000	24 Lapora n	158.000 .000	24 Lapora n	175.000 .000	24 Lapora n	192.500 .000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		60 Dokum en	3.347.6 01.000	60 Dokum en	3.699.3 08.779	60 Dokum en	4.536.8 00.000	60 Dokum en	4.649.0 00.000	60 Dokum en	4.766.0 00.000	60 Dokum en	4.997.0 00.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		36 Lapora n	304.680 .000	36 Lapora n	280.308 .779	36 Lapora n	310.000 .000	36 Lapora n	340.000 .000	36 Lapora n	375.000 .000	36 Lapora n	411.000 .000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	25.025. 000	12 Laporan	28.000. 000	12 Laporan	30.800. 000	12 Laporan	34.000. 000	12 Laporan	38.000. 000	12 Laporan	41.000. 000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	3.017.8 96.000	12 Laporan	3.391.0 00.000	12 Laporan	4.196.0 00.000	12 Laporan	4.275.0 00.000	12 Laporan	4.353.0 00.000	12 Laporan	4.545.0 00.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Output: Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara		7 Unit	173.177.800	7 Unit	190.000.000	7 Unit	209.000.000	7 Unit	230.500.000	7 Unit	255.000.000	7 Unit	280.000.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Output: Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	67.960.000	1 Unit	70.000.000	1 Unit	77.000.000	1 Unit	85.000.000	1 Unit	94.000.000	1 Unit	103.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
															1 4
, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Output: Terlaksananya Penyediaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		5 Unit	40.400. 000	5 Unit	70.000. 000	5 Unit	77.000. 000	5 Unit	85.000. 000	5 Unit	94.000. 000	5 Unit	103.000 .000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaia n pada Tahun Awal Peren canaa n (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															1 4
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Output: Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi		1 Unit	64.817. 800	1 Unit	50.000. 000	1 Unit	55.000. 000	1 Unit	60.500. 000	1 Unit	67.000. 000	1 Unit	74.000. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Perencanaan dan Pembangu an Industri Outcome: Meningkatny a Realisasi Pembangu an Industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	-	76,65%	2.342.3 02.360	76,69%	1.695.0 00.000	76,71%	1.864.5 00.000	76,73%	2.051.0 00.000	76,75%	2.256.3 00.000	76,77%	2.482.1 00.000	
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangu an Industri Kabupaten / Kota Output: Terfasilitasiny a IKM Yang Mendapatkan Pelatihan dan Pengembanga n SDM serta Terlaksananya a Fasilitas Sarana dan Prasarana Produksi Bagi IKM	Persentase perkembangan pelaku usaha industry agro dan non agro		90%	2.342.3 02.360	90%	1.695.0 00.000	90%	1.864.5 00.000	90%	2.051.0 00.000	90%	2.256.3 00.000	90%	2.482.1 00.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Output: Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan SDM Lainnya serta terlaksananya pemberian bantuan peralatan penunjang kegiatan IKM serta Terlaksananya kerjasama pendidikan vokasi penunjang IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		2 Dokum en	85.511.0 00	1 Dokum en	80.000.0 00	1 Dokum en	88.000.0 00	1 Dokum en	96.800.0 00	1 Dokum en	106.500. 000	1 Dokum en	117.200. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Output: Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan SDM Lainnya serta terlaksananya pemberian bantuan peralatan penunjang kegiatan IKM serta Terlaksananya kerjasama pendidikan vokasi penunjang IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		4 Dokum en	1.095.81 1.510	5 Dokum en	770.000. 000	5 Dokum en	847.000. 000	5 Dokum en	931.700. 000	5 Dokum en	1.024.90 0.000	5 Dokum en	1.127.40 0.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Output: Terlaksananya Pelatihan dan Pengembangan SDM Lainnya serta terlaksananya pemberian bantuan peralatan penunjang kegiatan IKM serta Terlaksananya kerjasama pendidikan vokasi penunjang IKM	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		4 Dokum en	1.098.69 8.250	4 Dokum en	780.000. 000	4 Dokum en	858.000. 000	4 Dokum en	943.800. 000	4 Dokum en	1.038.20 0.000	4 Dokum en	1.142.00 0.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembanguna n Industri Output: Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembanguna n Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		2 Dokum en	42.000. 000	1 Dokum en	40.000. 000	1 Dokum en	44.000. 000	1 Dokum en	48.400. 000	1 Dokum en	53.300. 000	1 Dokum en	58.700. 000	
Sub Kegiatan Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/K ota Output: Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/K ota	Jumlah pendampingan dan pengawasan produk halal		4 Dokum en	20.281. 600	4 Dokum en	25.000. 000	4 Dokum en	27.500. 000	4 Dokum en	30.300. 000	4 Dokum en	33.400. 000	4 Dokum en	36.800. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Outcome: Meningkatny a kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	-	14,07%	48.260. 200	18,18%	65.000. 000	25,64%	71.500. 000	35,56%	79.000. 000	47,06%	86.400. 000	52,63%	95.400. 000	14
Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/K ota Output: Terlaksananya Pendampingan Legalitas / Sertifikasi IKM	Persentase IKM yang mendapat fasilitasi pembinaan, peralatan, dan perizinan		90%	48.260. 200	90%	65.000. 000	90%	71.500. 000	90%	79.000. 000	90%	86.400. 000	90%	95.400. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Output: Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota Output: Terselenggaranya Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1 Dokumen	29.934. 750	1 Dokumen	35.000. 000	1 Dokumen	38.500. 000	1 Dokumen	42.500. 000	1 Dokumen	46.500. 000	1 Dokumen	51.500. 000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat															



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Sub Kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Output: Terasilitasi nya verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1 Dokum en	18.325. 450	1 Dokum en	30.000. 000	1 Dokum en	33.000. 000	1 Dokum en	36.500. 000	1 Dokum en	39.900. 000	1 Dokum en	43.900. 000
--	--	--	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat														
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Outcome:	Tersedianya Indormasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	-	14,07%	152.950 .250	18,18%	170.000 .000	25,64%	187.000 .000	35,56%	206.000 .000	76,75%	226.500 .000	47,06%	183.000 .000



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Baseline</i> 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri															
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Output: Meningkatnya Pengawasan Data Industri	Persentase Pengawasan data Industri dan pelaksanaan Monev		90%	152.950.250	90%	170.000.000	90%	187.000.000	90%	206.000.000	90%	226.500.000	90%	249.000.000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Output: Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		2 Dokum en	103.950 .250	1 Dokum en	125.000 .000	1 Dokum en	137.500 .000	1 Dokum en	151.500 .000	1 Dokum en	166.500 .000	1 Dokum en	183.000 .000	



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Outp ut	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (Basel ine 2024)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Industri Nasional (SIINas)															



PEMERINTAH
KABUPATEN MAGETAN

Bidang Urusan/Pro gram/ Outcome/ Kegiatan/S ub Kegiatan/O utput	Indikator Outcome/Out put	Data Capaian pada Tahun Awal Peren canaan (<i>Basel ine 2024</i>)	Target dan Pagu Indikatif Tahun												Ket .
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/K ota Melalui SIINas Output: Terdiseminasi dan Terpublikasik annya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/K ota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		1 Dokum en	49.000. 000	1 Dokum en	45.000. 000	1 Dokum en	49.500. 000	1 Dokum en	54.500. 000	1 Dokum en	60.000. 000	1 Dokum en	66.000. 000	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, 2025



Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Program Perencanaan dan Pengembangan Industri	Meningkatnya Realisasi Pembangunan Industri	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota	Sasaran RPJMD : Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Unggulan
		Pengembangan Kapasitas SDM IKM	Koordinasi, Sinkorinisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
			Sumber Daya Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
2.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Kualitas Sarana Perdagangan dan Distribusi Barang yang Efisien	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Sasaran RPJMD: Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Daerah Berbasis Unggulan
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
			Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
3.	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatnya Potensi Ekspor Daerah dan Pengembangan produk	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kemandirian Sektor Pertanian Berbasis Industri dan Pariwisata
			Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
4.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Meingkatnya Kelancaran Distribusi dan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Sasaran RPJMD: Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			Kegiatan Pengendalian Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
			Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	



No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Keterangan
			Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	

Sumber: RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

4.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:



Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PDRB Sektor Perdagangan	Juta Rupiah	2.637.306,77 juta rupiah	2.747.010,89 juta rupiah	2838.317760	2937658882	3040476942	3146893635	
2	PDRB Sektor Industri	Juta Rupiah	962.770,45 juta rupiah	1.928.261,61 juta rupiah	1.976.472,25	2.025.884,06	2.076.531,16	2.128.444,44	
3	Persentase Pertumbuhan Usaha Perdagangan	Persen	7,16 %	7,17 %	7,18 %	7,19 %	7,20 %	7,21 %	
4	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persen	0,201 %	0,202 %	0,203 %	0,204%	0,205 %	0,206%	
5	Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai	84,79	84,80	84,81	84,82	84,83	84,84	
6	Indeks kepuasan masyarakat	Nilai	79,90	80	80,10	80,20	80,30	80,40	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Magetan, 2025



4.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Kabupaten telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berikut ini adalah rincian indikator kinerja kunci (IKK) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan



Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Perindustrian										
1	Pencapaian Sasaran Pembanguann Daerah meliputi :									
	1. Pertumbuha n PDRB Sektor Industri Pengolahan Non Migas Kabupaten/ Kota	Persen	4,50	4,59	4,82	5,30	6,10	7,30	8,78	
	2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonimgas terhadap PDRB	Persen	12,26	12,34	12,42	12,50	12,59	12,67	13,27	



No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kabupaten/ Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	Orang	105.586	106.663	107.751	108.850	109.960	111.081	112.214	
	4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/ Kota	Rp Milyar	570,36	574,14	577,92	581,71	585,50	589,29	593,07	
	5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Rp Milyar	398,19	429.2	442.07	445.33	468,98	483.05	497.54	



No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kabupaten/ Kota									
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Persen	76,65	76,67	76,69	76,71	76,73	76,75	76,77	
3	Persentase jumlah perusahaan industri dan kawasan industri yang telah menindaklanju	Persen	76,65	76,67	76,69	76,71	76,73	76,75	76,77	



No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah perusahaan industry dan kawasan industri yang telah dilakukan pengawasan									
4	Persentase jumlah perusahaan industry dan kawasan industri yang memiliki tingkat	Persen	9,96	14,07	18,18	25,64	35,56	47,06	52,63	



No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kepatuhan minimal “Baik” dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan									
5	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	
Urusan Perdagangan										



No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Nilai Kinerja Perdagangan Barang dan Jasa kabupaten	Rp (Milyar)	24.577,30	26.240,44	27.903,58	29.566,73	31.229,87	32.893,01	34.556,16	
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	Persen	75,00	75,25	75,5	76	76,25	76,5	77	
Indikator Kinerja Daerah										
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	% Kontribusi	12,26	12,34	12,42	12,5	12,59	12,67	13,27	
2	% Pertumbuhan	%	4,50	4,59	4,82	5,3	6,1	7,32	8,78	



No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	PDRB Sektor Industri									
3	% Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	%	4,55	4,6	4,65	4,7	4,75	4,8	4,85	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, 2025

BAB V

PENUTUP





BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Rencana Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah. pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Magetan.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana



Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

4. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Magetan periode berjalan.
5. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
6. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
7. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
8. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.



5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan. Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku.



Foto: M. Zulfan